

**SKRIPSI**

**DAMPAK ALOKASI DANA DESA TERHADAP  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KECAMATAN  
SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH**



**Disusun Oleh:**

**BUSTAMI  
NIM. 160604018**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M / 1442 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Bustami

NIM : 160604018

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Juli 2021

Yang Menyatakan,



Bustami

# LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi

Dengan Judul:

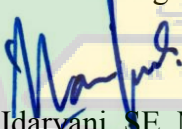
**Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan  
Perempuan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh**

Disusun Oleh:

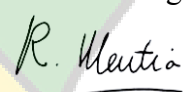
Bustami  
NIM. 160604018

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

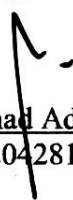
Pembimbing I

  
Dr. Idaryani, SE., M.Si  
NIDN. 0105057503

Pembimbing II

  
Rachmi Meutia, M.Sc  
NIP. 198803192019032013

Mengetahui Ketua  
Program Studi Ilmu Ekonomi .

  
Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si  
NIP. 197204281999031005

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL  
SKRIPSI**

Bustami  
NIM. 160604018

Dengan Judul:  
**Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Perempuan di  
Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh**

Telah Diseminarkan oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata satu (S-1) dalam bidang  
Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 12 Januari 2021 M  
28 Jumadil Awal 1442 H

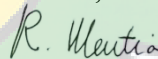
Banda Aceh  
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,



Dr. Adanyani, SE., M.Si  
NIDN. 0105057503

Sekretaris,



Rachmi Meutia, M.Sc  
NIP. 198803192019032013

Penguji I,

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si  
NIP. 197204281999031005

Penguji II,

Jalilah, S.HI., M.Ag  
NIDN. 2008068803

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN  
AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Bustami

NIM : 160604018

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi

E-mail : 160604018@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

yang berjudul:

**Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 5 April 2021

Mengetahui,

Penulis

Bustami

NIM. 160604101

Pembimbing I

Dr. Idaryani, S.P., M.Si

NIDN. 0105057503

Pembimbing II

Rachmi Meutia, M.Sc

NIP. 198803192019032013

## KATA PENGANTAR



Segala puji kita haturkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman Jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata 1 Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah, penulisan skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan, tentunya berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh beserta seluruh Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku ketua prodi Ilmu Ekonomi, sekaligus penasehat akademik penulis.  
Marwiyati, SE., MM selaku sekretaris prodi Ilmu Ekonomi

dan seluruh staf ahli program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

3. Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan masukan yang penulis butuhkan selama ini.
4. Dr. Idaryani, SE., M.Si selaku dosen pembimbing II yang senantiasa selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, membina, memberi petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Rachmi Meutia, M.Sc selaku dosen pembimbing I yang senantiasa selalu sabar dalam membimbing, membina, memberi petunjuk dan menghadapi problematika yang penulis hadapi.
6. Seluruh dosen program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga.
7. Kepada Ibunda, ayah, kakak, adek dan keluarga tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, waktu, doa serta dukungan moril maupun materil yang tak terhingga.
8. Sahabat-sahabat saya selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis

9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Ekonomi 2016 yang telah memberikan sumbangan pikiran dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman keluarga besar HmI Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, HMP Ilmu Ekonomi, yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, bila terdapat kekurangan dan kesalah pahaman dalam penulisan skripsi ini, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini

Banda Aceh, Februari 2021

Penulis,

Bustami



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / ِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / ِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutoh* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutoh* ada dua.

- a. *Ta marbutoh* (ة) hidup

*Ta marbutoh* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutoh* (ة) mati

*Ta marbutoh* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

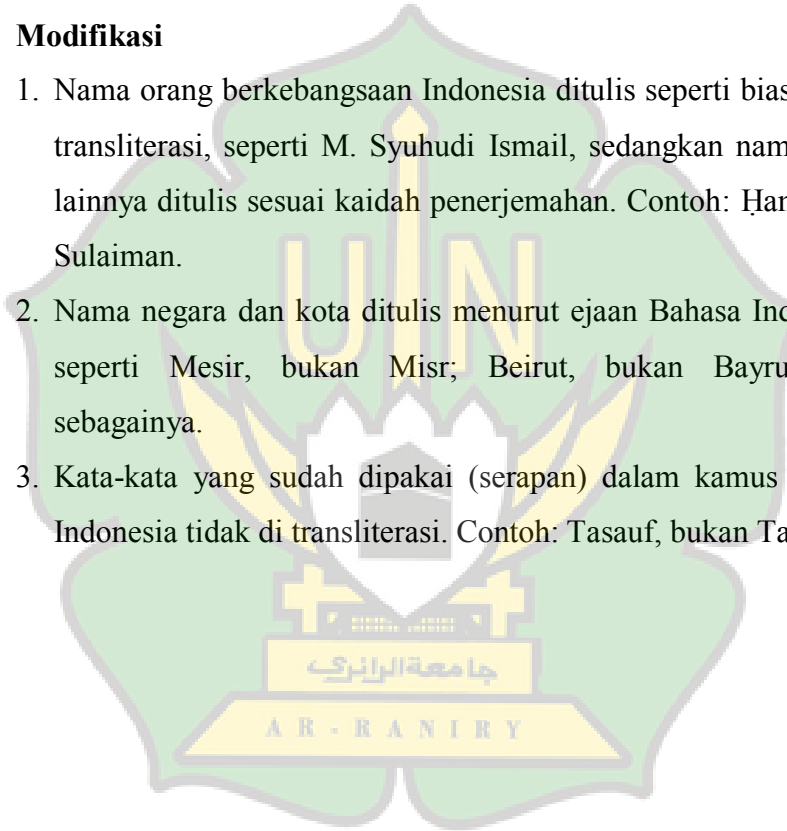
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutoh* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutoh* (ة) itu ditransliterasikan dengan h. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl/ raudatulatfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah</i>
طَلْحَةَ	: <i>Talhah</i>

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak di transliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## ABSTRAK

Nama : Bustami  
NIM : 160604018  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ilmu Ekonomi  
Judul : Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh  
Pembimbing I : Dr. Idaryani, SE., M. Si  
Pembimbing II : Rachmi Meutia, M. Sc

Dana desa berfungsi untuk pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur desa serta pemberdayaan masyarakat desa, khususnya pemberdayaan perempuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengalokasian dana desa oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dampak transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi dana desa terhadap pemberdayaan perempuan di kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 99 responden yang merupakan penduduk perempuan Kecamatan Syiah Kuala. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah metode *Purposive Sampling*. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang diproses dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi dana desa mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pemberdayaan perempuan perempuan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

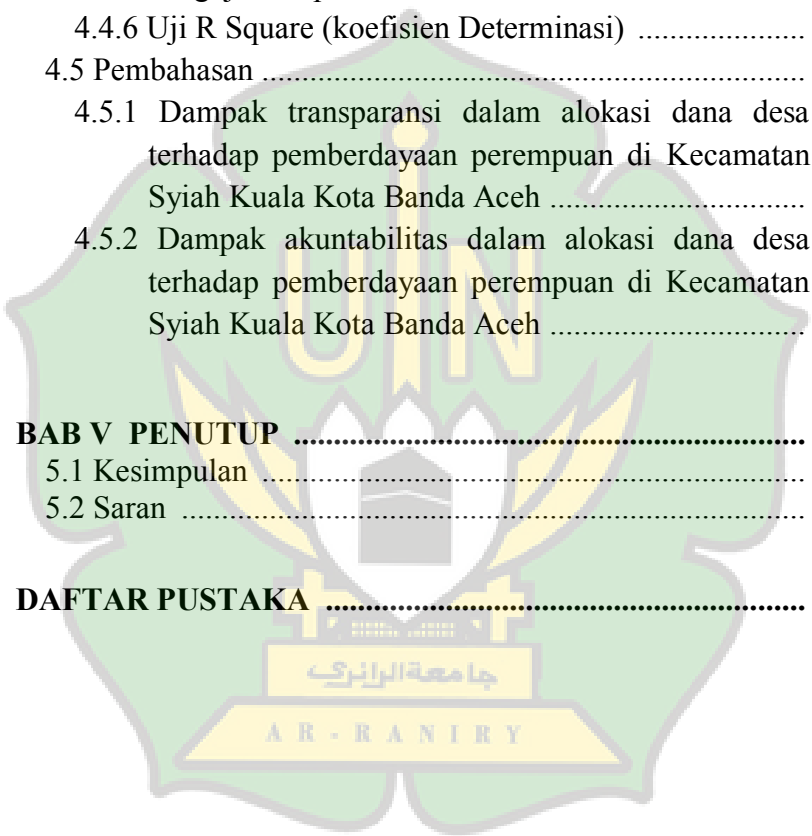
**Kata Kunci** : *Transparansi, Akuntabilitas, Pemberdayaan Perempuan*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1 Dana Desa .....	14
2.1.1 Pengertian Dana Desa .....	14
2.1.2 Alokasi Dana Desa .....	15
2.2 Transparansi .....	17
2.2.1 Pengertian Transparansi .....	17
2.2.2 Karakteristik Transparansi .....	18
2.2.3 Prinsip-Prinsip Transparansi .....	20
2.3 Akuntabilitas .....	21
2.3.1 Pengertian Akuntabilitas .....	21
2.3.2 Macam-Macam Akuntabilitas .....	22
2.3.3 Prinsip-prinsip Akuntabilitas .....	24
2.3.4 Dimensi Akuntabilitas .....	25
2.4 Konsep Pemberdayaan .....	26
2.4.1 Pengertian Pemberdayaan .....	26
2.4.2 Tahapan atau Proses Pemberdayaan .....	27

2.4.3 Indikator Pemberdayaan .....	30
2.5 Pemberdayaan Perempuan .....	35
2.5.1 Program Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi .....	39
2.6 Teori Gender .....	43
2.6.1 Pengertian Gender .....	43
2.6.2 Kesetaraan Gender .....	44
2.6.3 Ketidakadilan Gender .....	46
2.7 Penelitian Terkait .....	47
2.8 Kerangka Berpikir .....	52
2.9 Hipotesis .....	52
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	54
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	54
3.3 Populasi dan Sampel .....	55
3.4 Definisi Operasional Variabel .....	56
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	59
3.5.1 Skala Pengukuran Data .....	60
3.6 Teknik Analisis Data .....	60
3.6.1 Model Penelitian .....	60
3.6.2 Uji Coba Instrumen .....	61
3.6.3 Uji Asumsi Klasik .....	62
3.6.4 Pengujian Hipotesis .....	63
3.6.5 Koefisien Determinasi .....	64
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>65</b>
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Syiah Kuala .....	65
4.1.1 Luas Desa Kecamatan Syiah Kuala .....	65
4.1.2 Batas-Batas Desa Kecamatan Syiah Kuala .....	65
4.1.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Syiah Kuala .....	67
4.1.4 Visi Misi Kecamatan Syiah Kuala .....	68
4.2 Penerimaan Dana Desa Kecamatan Syiah Kuala .....	69
4.3 Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Syiah Kuala .....	70

4.4 Hasil Penelitian .....	71
4.4.1 Karakteristik Responden .....	71
4.4.2 Validitas dan Reabilitas .....	73
4.4.3 Uji Asumsi Klasik .....	75
4.4.4 Regresi Linier Berganda .....	80
4.4.5 Pengujian Hipotesis .....	81
4.4.6 Uji R Square (koefisien Determinasi) .....	84
4.5 Pembahasan .....	85
4.5.1 Dampak transparansi dalam alokasi dana desa terhadap pemberdayaan perempuan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh .....	85
4.5.2 Dampak akuntabilitas dalam alokasi dana desa terhadap pemberdayaan perempuan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh .....	87
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
5.1 Kesimpulan .....	90
5.2 Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rincian Jumlah Dana Desa Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019 .....	2
Tabel 1.2	Rincian Alokasi Dana Desa Menurut Kabupaten di Aceh Tahun 2019.....	6
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel .....	57
Tabel 2.1	Penelitian Terkait .....	48
Tabel 4.1	Data luas desa kecamatan Syiah Kuala .....	65
Tabel 4.2	Batas-Batas Desa Dalam Kecamatan Syiah Kuala .....	66
Tabel 4.3	Data Jumlah Penduduk kecamatan Syiah Kuala ...	68
Tabel 4.4	Daftra Realisasi Alokasi Dana Desa Kecamatan Syiah Kuala .....	70
Tabel 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	72
Tabel 4.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir .....	73
Tabel 4.7	Uji Validitas .....	74
Tabel 4.8	Uji Reliabilitas .....	75
Tabel 4.9	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test .....	76
Tabel 4.10	Uji Multikolinieritas .....	78
Tabel 4.11	Uji Heteroskedastisitas .....	79
Tabel 4.12	Hasil Regresi Linier Berganda .....	80
Tabel 4.13	Uji t .....	82
Tabel 4.14	Uji F .....	83
Tabel 4.16	Uji R Square .....	84

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	52
Gambar 4.1 Grafik Histogram .....	77
Gambar 4.2 Normal P-P Plot Test .....	77



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian .....	97
Lampiran 2	Jawaban Responden Terhadap Masing-Masing Pertanyaan .....	102
Lampiran 3	Hasil Output SPSS .....	107
Lampiran 4	Dokumentasi.....	111



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia ialah negara kesatuan yang terdiri dari 34 Provinsi yang tersebar dari ujung Barat sampai Timur Indonesia, yang mempunyai 415 kabupaten, 1 kabupaten administrasi, 93 kota, serta 5 kota administrasi. Peraturan Menteri Dalam Negara No 56 tahun 2015 tentang Informasi Daerah Administrasi Pemerintahan disebutkan kalau jumlah desa serta kelurahan di Indonesia merupakan 83. 184( 74. 754 desa+ 8. 430 kelurahan). (Inayatsyah, dkk 2019).

Dalam sistem yang berlaku saat ini, wewenang penting dimiliki oleh desa dalam membantu pemerintah daerah dibidang pemerintahan, termasuk pembangunan. Ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam mendukung penerapan otonomi daerah. Proses desentralisasi yang sudah berlangsung sudah meningkatkan pemahaman tentang berartinya kemandirian wilayah yang berpacu pada kemandirian lokal. Secara esensi kemandirian wajib diawali dari tingkat pemerintahan yang sangat dasar ialah desa. Dengan ruang lingkup yang lebih kecil jika dibandingkan dengan pemerintah kabupaten, pemerintah desa diyakini lebih sanggup memandang setiap kebutuhan yang seharusnya lebih diprioritaskan. Salah satu program pemerintah dalam menunjang pembagunan desa merupakan dengan mengeluarkan dana desa bagaikan salah satu sumber pendapatan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun desa menerima dana yang cukup besar yang dianggarkan oleh pemerintah pusat. Desa diberikan kewenangan dan dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Kemenkeu, 2019).

Provinsi Aceh dengan keistimewaannya mempunyai qanun no 5 tahun 2003 tentang Pemerintah desa. Untuk menyamakan pembangunan antara desa dengan kota, kerja keras dari berbagai unsur seperti seperti pemerintah daerah, unsur desa, serta masyarakat itu sendiri, sangat diperlukan dalam hal ini. Tujuan dari pembangunan adalah untuk menjamin dan mejadikan taraf hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

**Tabel 1.1**  
**Rincian Jumlah Dana Desa Menurut Provinsi di Pulau Sumatera**  
**Tahun Anggaran 2019**  
(Dalam Ribuan Rupiah)

Nama Daerah	Dana Desa 2019
Aceh	4.885.500.482
Sumatera utara	4.452.049.366
Sumatera barat	932.325.519
Riau	1.436.685.874
Jambi	1.184.558.060
Sumatera Selatan	2.683.946.345
Bengkulu	1.079.418.707
Lampung	2.427.111.117
Kepulauan Riau	261.333.056

Sumber : Kemenkeu (2019)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan anggaran jumlah dana desa yang didapatkan oleh provinsi Aceh menjadi penerima anggaran dana desa tertinggi di Pulau Sumatera. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa besarnya jumlah anggaran dana desa yang diterima oleh Aceh belum mampu sepenuhnya mensejahterakan masyarakat. Hal ini salah satunya disebabkan karena kurang optimalnya pengelolaan dari fungsi dana itu sendiri. Dana desa banyak dilimpahkan untuk pembangunan fisik desa dan sedikit yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat khususnya para pekerja perempuan. Padahal jika kita mmerujuk pada apa yang telah diamanatkan melalui dana desa ini, tujuan utama dana desa bukan hanya untuk program pembangunan fisik desa saja, tetapi program pemberdayaan juga menjadi fokus utama dari tujuan dana desa (Ridha, 2019). Peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan sehingga berujung pada meningkatnya jumlah pendapatan dan mencapai tingkat kesejahteraan.

Dengan jumlah dana desa yang besar, tentunya membawa pengaruh positif terhadap desa, diantaranya seperti tersedianya berbagai infrastruktur di desa serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Jumlah dana desa yang besar ini akan menjadi suatu masalah dan taantangan serta menjadi masalah yang serius apabila tidak diiringi kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik

dan benar. Korupsi dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa merupakan suatu pokok permasalahan yang sangat serius dalam hal ini.

Dengan banyaknya permasalahan yang timbul dari pengalokasian dana desa yang besar tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 dalam pasal 2 menyebutkan bahwa “keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” (Ardiyanti, 2019). Untuk meminimalisir kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa, maka keempat hal ini dirumuskan.

Transparansi adalah prinsip untuk membuka diri kepada masyarakat sebagai upaya untuk perolehan akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan, dan rahasia negara (Jubaedah, 2008). Dalam mengelola dana desa, tindakan yang sesuai dengan aturan hukum dan etika yang berlaku serta sesuai dengan amanat yang diberikan oleh masyarakat yang merupakan maksud dari transparansi ini. Dengan kata lain, transparansi dilakukan untuk penjelasan dan pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat oleh pengelola dana desa mengenai program dan kebijakan yang dilakukan serta sumber daya yang digunakan dalam realisasi program atau kebijakan tersebut. Sedangkan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang diberikan kepada publik

dalam hal ini adalah masyarakat atas setiap aktivitas yang dilakukan (Jubaedah, 2008).

Pemasangan pengumuman anggaran dan realisasi biaya di balai desa merupakan suatu upaya yang sering dilakukan oleh aparat desa dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas. Tujuan dilakukan hal ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat mengetahui pengelolaan keuangan yang dikelola oleh aparat desa. Hal ini merupakan hal yang mudah untuk dilakukan oleh pemerintah desa untuk memberikan informasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dikarenakan target penggunaan dana desa untuk seluruh masyarakat, maka suatu kewajiban bagi pemerintah desa untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas mengenai pengelolaan dana desa. Dalam hal ini peneliti menggunakan azas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sebagai variabel dalam penelitian ini yang akan dihubungkan dengan pemberdayaan perempuan.

Banda Aceh memiliki 9 kecamatan dan 90 desa dengan kode pos 23111-23244 (dari total 243 kecamatan dan 5827 desa di seluruh Aceh). Per tahun 2010 jumlah penduduk di wilayah ini adalah 224.209 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 115.296 pria dan 108.913 wanita (rasio 105,86). Dengan luas daerah 617 ha (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 5.677.081 ha), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 36.425 jiwa/km<sup>2</sup> (dibanding kepadatan



provinsi 78 jiwa/km<sup>2</sup>). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 238.814 jiwa dengan luas wilayahnya 61,36 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 3.892 jiwa/km<sup>2</sup>.

Jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain, penerimaan anggaran dana desa Kota Banda Aceh jauh lebih sedikit. Hal ini dikarenakan bahwa jumlah desa yang ada di kabupaten lain lebih banyak daripada di Kota Banda Aceh sesuai dengan luas kabupaten/kota tersebut. Selain itu, masyarakat Kota Banda Aceh pada umumnya hampir rata-rata memiliki pendapatan diatas rata-rata. Kota Banda Aceh sendiri dapat dikategorikan sebagai kota dengan masyarakat kelas menengah dilihat dari jenis pekerjaan masyarakatnya dimana dominannya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Swasta, selebihnya berprofesi sebagai pedagang dan lainnya

**Tabel 1.2**  
**Rincian Alokasi Dana Desa Menurut Kabupaten di Aceh**  
**Tahun Anggaran 2019**  
(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Nama Desa	Dana Desa TA 2019
1	Aceh Barat	249.482.526
2	Aceh Besar	438.519.093
3	Aceh Selatan	203.653.902
4	Aceh Singkil	106.901.862
5	Aceh Tengah	221.436.663
6	Aceh Tenggara	283.801.698
7	Aceh Timur	387.123.385
8	Aceh Utara	627.981.678
9	Bireun	453.997.662
10	Pidie	525.951.016
11	Simeulu	17.222.029

**Lanjutan Tabel 1.2**

12	Banda Aceh	74.192.333
13	Sabang	23.635.698
14	Langsa	57.772.687
15	Lhokseumawe	58.773.330
16	Gayo Lues	112.011.067
17	Aceh Barat Daya	117.947.229
18	Aceh Jaya	134.071.262
19	Nagan Raya	174.634.430
20	Aceh Tamiang	170.293.947
21	Bener Meriah	180.968.089
22	Pidie jaya	165.797.075
23	Subulussalam	69.331.821

Sumber : Kemenkeu (2019)

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan (Sumaryadi & I Nyoman, 2005). Untuk menunjang pembangunan desa, fokus dana desa bukan hanya untuk pembangunan fisik desa saja, akan tetapi pemberdayaan masyarakat juga harus dijadikan fokus utama tidak terkecuali para pekerja perempuan.

Perempuan merupakan sumber daya manusia yang mempunyai potensi yang besar yang dapat digunakan dan diaplikasikan dalam berbagai bidang sektor pembangunan nasional. Sejak kemerdekaan Indonesia, perempuan menjadi tumpuan bagi pembangunan bangsa ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peran perempuan

sebagai pahlawan pembela tanah air. Hal tersebut membuat banyak ahli sosial mengutarakan bahwa perempuan bisa menjadi aktor pembawa kelangsungan pembangunan bangsa. Tenaga perempuan yang cakap dan perempuan ideal sangat dibutuhkan di era milenial, yaitu perempuan yang bisa menjalankan peran rangkapnya (peranan ganda). Perempuan tidak hanya sebatas mengurus rumah tangga, tetapi juga bekerja untuk mendapatkan penghasilan.

Perempuan dengan peran ganda dituntut untuk memiliki ketrampilan tambahan dan ilmu pengetahuan untuk menunjang peranannya, mereka harus mempunyai ketrampilan pada bidang pekerjaan yang ia kerjakan. Oleh sebab itu, dibutuhkan berbagai pelatihan ketrampilan dan skil kerja untuk peningkatan ketrampilan para pekerja terutama pekerja perempuan. Dalam hal ini, sebagai ujung tombak dari pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, desa harus mampu menjadi sarana untuk mengembangkan ketrampilan masyarakat dengan tujuan akhir adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Diera yang makin maju ini semakin banyak perempuan yang masuk dalam dunia tenaga kerja baik dalam pemerintahan maupun diluarnya. Tenaga kerja perempuan adalah seorang perempuan yang sanggup melakukan kegiatan/pekerjaan guna memperoleh barang atau jasa untuk dapat memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Masuknya wanita dalam dunia tenaga kerja bukan saja didorong oleh kesempatan tenaga kerja yang luas namun juga ada dorongan dari dalam wanita itu

sendiri bekerja untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarganya dengan pendapatan yang dihasilkan.

Syiah Kuala merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh. Sebagai salah satu kecamatan dengan jumlah penerimaan dana desa terbesar di Banda Aceh, Kecamatan Syiah Kuala telah mengalokasikan dana tersebut untuk berbagai program pembangunan desa. Diantara berbagai program yang dijalankan melalui alokasi dana desa adalah untuk pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan perempuan. Berbagai kegiatan atau program pemberdayaan perempuan dilaksanakan dengan tujuan yang sesuai dengan programnya yaitu untuk memberdayakan perempuan. Peran perempuan dalam pengalokasian dana desa sangat penting, ide-ide dan gagasan yang dimunculkan dalam musrembang desa oleh kaum perempuan sangat banyak yang digunakan atau dipakai oleh pemerintah desa. Berbagai pelatihan yang diadakan oleh pemerintah desa khususnya untuk kaum perempuan diharapkan dapat meningkatkan skill dan kemampuan serta dapat memberdayakan kaum perempuan di desa. Tidak hanya itu, kaum perempuan juga dilibatkan dalam berbagai program padat karya tunai di desa, sehingga kaum perempuan dapat membantu perekonomian keluarga. Dengan terlibatnya peran perempuan dalam proses pembangunan ekonomi desa yang didukung oleh peran pemerintah diharapkan perekonomian desa tersebut dapat tumbuh lebih cepat dan dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Penelitian tentang pemberdayaan masyarakat dari dana desa telah banyak dilakukan. Ardiyanti (2019) dengan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Penelitiannya menyimpulkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Afifudin, dkk (2018) dengan tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas kelola keuangan ADD, kebijakan desa, dan keuangan desa terhadap pemberdayaan penduduk desa Pudungsiri. Penelitiannya menyimpulkan bahwa akuntabilitas kelola keuangan ADD, kebijakan desa, dan keuangan desa mempunyai pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan penduduk desa Pudungsiri

Nazilla (2018) dengan judul penelitiannya “Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)”. Penelitiannya menyimpulkan bahwa efek dari pengalokasian dana desa dalam mensejahterakan di desa Geuceu Komplek dikatakan efektif, karena pembangunan yang dibangun memenuhi kebutuhan masyarakat, dan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan mendapat respon positif dari masyarakat

khususnya ibu-ibu yang berprofesi sebagai IRT, yang dilihat dari minat dalam partisipasi kegiatan tersebut.

Rochmayanti, (2015) dengan judul penelitiannya “Pemberdayaan Perempuan Melalui Alokasi Dana Desa (Studi tentang Peran PKK di Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)”. Penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor pendukung yang mendukung pemberdayaan perempuan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo: Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa serta peran PKK di Desa Sidodadi, dan partisipasi masyarakat sehingga membentuk kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan pihak-pihak terkait. Adapun faktor yang menghambat jalannya program pemberdayaan adalah; Dana ADD yang jumlahnya minim setiap tahunnya dari pemerintah serta tingkat kesadaran dan antusiasme masyarakat yang rendah, terutama dalam pengkaderan PKK di Desa sehingga perlu upaya yang lebih mememberdayakan masyarakat agar sadar akan perlunya pemberdayaan.

Berdasarkan latar belakang dan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut, dapat dilihat bahwa sangat banyak faktor yang mendorong dan menghambat pemberdayaan perempuan melalui alokasi dana desa. Berdasarkan analisa penulis bahwa ditemukannya faktor-faktor yang berbeda yang dalam berbagai penelitian sehingga penulis ingin melakukan penelitian selanjutnya guna melihat dampak yang dari pengalokasian dana desa terhadap pemberdayaan perempuan di Kota Banda Aceh serta faktor yang

mendorong dan menghambatnya. Dengan demikian judul penelitian ini yang disusun adalah **“Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dampak transparansi dalam alokasi dana desa terhadap pemberdayaan perempuan di kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh?
2. Bagaimana dampak akuntabilitas dalam alokasi dana desa terhadap pemberdayaan perempuan di kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh?
3. Bagaimana dampak transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi dana desa terhadap pemberdayaan perempuan di kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dampak transparansi dalam alokasi dana desa terhadap pemberdayaan perempuan di kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui dampak akuntabilitas dalam alokasi dana desa terhadap pemberdayaan perempuan di kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh

3. Untuk mengetahui dampak transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi dana desa terhadap pemberdayaan perempuan di kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambahkan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) terhadap program pemberdayaan perempuan, baik bagi peneliti maupun bagi pembaca.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan ADD serupa.
3. Sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.
4. Hasil penelitian agar dapat digunakan sebagai informasi untuk pemerintah dalam pengambilan kebijakan dalam hal pemberdayaan perempuan di Kota Banda Aceh umumnya dan Kecamatan Syiah Kuala khususnya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Dana Desa**

##### **2.1.1 Pengertian Dana Desa**

Dana desa adalah dana APBN yang dialokasikan ke desa yang ditransfer melalui APBD daerah / kota, dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Kementerian Keuangan, 2019).

Dana desa merupakan anggaran yang banyak disediakan oleh pemerintah untuk desa. Pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan sumber dana perimbangan fiskal pusat dan daerah. Dana desa yang disediakan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang dialokasikan menggunakan dana desa melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang jelas, berbasis prinsip, dan melalui berbagai tahapan. Semua laporan transparan dan dapat dijelaskan. (Lina, 2018)

Dana desa mengacu pada dana yang dialokasikan ke desa dari APBN, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah / kota. Dana tersebut digunakan untuk pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. (Buleleng, 2018)

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN, diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar-desa”.

### **2.1.2 Alokasi Dana Desa**

Untuk menyelenggarakan otonomi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa. Pada kenyataannya, tujuan dari kebijakan penyaluran dana di tingkat desa kurang lebih sama, yaitu untuk sepenuhnya mereformasi gagasan ortodoks pemerintah kabupaten dalam memberikan kekuasaan, layanan, dan bantuan keuangan kepada pemerintah (desa) yang lebih rendah (Rozaki, 2005). Melalui metode pengalokasian dana desa, model kebijakan pemerintah yang semula terpusat dan didominasi diubah menjadi partisipatif, responsif, dan dilaksanakan melalui asas desentralisasi.

Prinsip-prinsip dalam mengelola Alokasi Dana Desa adalah partisipatif, bertanggungjawab, terbuka serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena diperlukan adanya pengawasan dan evaluasi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa agar pelaksanaan alokasi dana desa dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Santosa (2008) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan penyaluran dana desa adalah:

1. Sesuai dengan kewenangan pemerintah tingkat desa, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tingkat desa dalam hal penyelenggaraan pembangunan dan masyarakat.
2. Sesuai dengan potensi desa, meningkatkan kapasitas perencanaan organisasi sosial, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif
3. Meningkatkan distribusi pendapatan, kesempatan kerja dan peluang usaha di masyarakat pedesaan
4. Medorong peningkatan swadaya gotong royong

Selain memberikan manfaat bagi masyarakat desa, penyaluran dana tingkat desa juga memberikan manfaat individual bagi daerah / kota, antara lain:

1. Pemerintah kabupaten/kota dapat menghemat tenaga dengan membiarkan desa mengelola otonominya tanpa tetap bergantung pada kabupaten/kota.
2. Pemerintah kabupaten/kota dapat lebih fokus untuk terus mengembangkan pelayanan publik secara besar-besaran, yang lebih strategis dan efektif dalam jangka panjang.

Alokasi Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang besarnya telah tertuang dalam peraturan desa anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Dalam hal ini kepala desa mempunyai peran sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan alokasi dana desa. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penggalangan dana dengan meng

gunakan penyaluran dana tingkat desa secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku. Mengenai pembahasan alokasi dana tersebut, (Sidik, 2002) bahwa sebenarnya “konsep alokasi dana desa tersebut bermula dari sebuah kritik dan refleksi terhadap model bantuan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bersamaan dengan agenda pembangunan desa sejak tahun 1969”.

Dari sisi alokasi dana desa, keseluruhan kebijakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus mendukung jalannya demokrasi desa, sekaligus memperkuat otonomi masyarakat dalam pengadaan pemerintahan dan pembangunan desa. Oleh karena itu dengan munculnya pemerintahan desa pada akhirnya dituntut untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Padahal, pada prinsipnya daerah atau kota telah merumuskan kebijakan penyaluran dana desa untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mewujudkan hak desa.

## **2.2 Transparansi**

### **2.2.1 Pengertian Transparansi**

Transparansi berasal dari kata transparency adalah prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara (Jubaedah & dkk, 2018).

Transparansi sesuai dengan irman Allah dalam QS. Al-an'am: 152 yang artinya *“Dan Janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperuntukkan Allah kepadamu agar kamu ingat”*.

Dalam ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa “Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil” mengandung arti bahwa “dalam melakukan sesuatu apapun, Allah mengetahui apa yang menjadi kebenarannya. Oleh karena itu, dalam keadaan dan situasi apapun, harus selalu berbuat jujur, dimana jujur tersebut merupakan konsep mendasar dari transparansi ini. Selain itu, ayat tersebut juga menerangkan bahwa “Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu”. Dalam keadaan dan kondisi apapun, baik dalam masalah hukum dan lain sebagainya, manusia harus selalu senantiasa bersikap adil yang dalam hal ini menerangkan tentang kejujuran, meskipun masalah tersebut menyangkut keluarganya sendiri.

### **2.2.2 Karakteristik Transparansi**

Transparansi harus selalu terbuka terhadap segala tindakan, siap menerima segala macam kritik dan pendapat, serta

bertanggung jawab. Ini dapat diterapkan menggunakan karakteristik transparansi berikut:

### 1. Informativeness (informatif)

Proses pemberian informasi, berita, prosedur, data, fakta dan mekanisme kepada stakeholders yang membutuhkan informasi harus jelas dan akurat.

### 2. Openess (Keterbukaan)

Keterbukaan informasi merupakan hak yang harus diperoleh oleh stakeholder. Sehingga setiap stakeholder dapat mengakses segala informasi dan data yang telah diungkapkan

### 3. Disclosure (Pengungkapan)

Pengungkapan yang dimaksud adalah pengungkapan atas aktivitas maupun kinerja secara finansial kepada stakeholder. Pengungkapan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib adalah semua tanggung jawab perusahaan yang diwajibkan untuk mengungkapkan sesuai dengan standar akuntansi atau prosedur operasi standar dan peraturan badan pengatur. sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan sukarela di luar persyaratan perusahaan, standar akuntansi dan peraturan badan pengawas (Mardiasmo, 2004).

Jadi, transparansi merupakan “asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi secara luas dan mudah mengenai data keuangan. Oleh karena itu, dengan adanya transparansi akan menjamin

kebebasan kepada masyarakat untuk mengakses seluruh informasi mengenai penyelenggaraan dan/atau pengelolaan keuangan serta penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mulai dari perencanaan hingga hasil yang telah dicapai” .

### **2.2.3 Prinsip-Prinsip Transparansi**

Prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. terbuka yaitu perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran keuangan desa memiliki berbagai saluran untuk partisipasi publik dan pemangku kepentingan.
- b. Bisa diketahui oleh masyarakat luas, terlepas dari kondisi sosial dan ekonomi status keuangan desa, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi yang paling luas dan murah, yang murah untuk semua kelompok di lingkungan pemerintahan desa.
- c. Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat, keputusan yang diambil dalam penyusunan anggaran dana desa yang diputuskan dalam musyawarah rencana pembangunan tingkat desa (Musrembang) melibatkan
- d. Adanya ide atau aspirasi masyarakat desa, pemerintah desa harus menyesuaikan dengan gagasan atau keinginan masyarakat desa, kemudian mengubahnya menjadi keputusan desa.

Didjaja (2003) berpendapat bahwa prinsip transparansi tidak hanya terkait dengan masalah keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan tersebut juga mencakup lima (lima) item berikut:

1. Komunikasi terbuka pada pertemuan penting, dan orang dapat mengungkapkan pendapat mereka.
2. Keterbukaan informasi terkait dokumen yang perlu diketahui publik.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur perencanaan)
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah, dll.)
5. Terbuka untuk menerima partisipasi masyarakat  
Adapun indikator dari transparansi yaitu:
  1. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
  2. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.
  3. Keterbukaan dalam pengelolaan
  4. Keterbukaan informasi tentang pengelolaan ADD

## **2.3 Akuntabilitas**

### **2.3.1 Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas dalam bahasa Inggris biasa disebut *accountability* atau *accountable* yang artinya “dapat dipertanggungjawabkan”. Akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang berhak atau berwenang menerima dan / atau meminta informasi atau pertanggungjawaban untuk menjawab dan menjelaskan perbuatan



perseorangan, badan hukum, dan / atau pimpinan organisasi.(Adisasmita, 2011).

Akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang telah diamanahkan kepada entitas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas mencakup dua jenis, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal (Mardiasmo, 2004). . Secara umum, akuntabilitas vertikal adalah “pertanggungjawaban yang hubungannya antara atasan kepada bawahan atau dalam ilmu pemerintahan berarti pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat. Sedangkan akuntabilitas horisontal adalah pertanggungjawaban yang bentuknya horisontal, yaitu kepada masyarakat”.

Halim (2014) sistem akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau jawaban dan menjelaskan kinerja dan perilaku individu / badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak-pihak yang mempunyai hak atau kewenangan untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik digunakan untuk bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan implementasi kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor ketika mencapai tujuan yang ditentukan secara teratur.

### **2.3.2 Macam-Macam Akuntabilitas**

Secara umum mengenai penjelasan akuntabilitas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan tanggung jawab

lembaga yang berwenang mengelola sumber daya publik.. Menurut Ulum (2015) tipe akuntabilitas dibeda menjadi dua bagian yaitu:

### 1. Akuntabilitas Internal

Akuntabilitas yang berlaku untuk setiap tingkatan organisasi internal penyelenggaraan pemerintah negara termasuk juga pemerintah yang mana masing-masing pejabat atau pengurus publik. Dalam sistem akuntabilitas ini, setiap pejabat atau manajer publik, baik individu maupun kolektif, harus bertanggung jawab kepada atasannya secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan, untuk mengembangkan kinerja kegiatan.

### 2. Akuntabilitas Eksternal

Akuntabilitas yang menempel kepada Setiap lembaga nasional sebagai organisasi harus bertanggung jawab atas semua tugas yang telah diterima dan dilaksanakan, serta perkembangan komunikasi dengan pihak eksternal di lingkungan.

Menurut Supriatna (2001) akuntabilitas dapat dibedakan atas: *democratic accountability*, *professional accountability*, dan *legal accountability*, dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

#### 1. Democratic Accountability

Akuntabilitas demokratis merupakan kombinasi dari akuntabilitas administratif dan politik. *Democratic accountability* menjelaskan pemerintah yang bertanggung jawab kepada para pemimpinnya atas kinerja dan semua aktivitasnya. Penyelenggaraan pelayanan publik bertanggungjawab pada pimpinan dari instansi masing-masing. Dalam hal ini, pelaksanaan

sistem pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang dari pimpinan tingkat bawah sampai dengan pimpinan tingkat atas

## 2. Professional Accountability

Dalam sistem akuntabilitas profesional, para ahli, profesional dan ahli teknis biasanya menjalankan tugasnya sesuai dengan norma dan standar profesi untuk menentukan kepentingan umum atau kepentingan umum.

## 3. Legal Accountability

Menurut kategori akuntabilitas legal (hukum), pelaksana hukum disesuaikan dengan kepentingan barang publik dan layanan publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas diadakan sesuai dengan hukum, dan setiap pejabat layanan publik dapat dituntut jika ia gagal dan dihukum karena gagal melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Laporan pertanggungjawaban hukum akan menunjukkan kesalahan dan kegagalan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### 2.3.3 Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Dalam melaksanakan akuntabilitas di instansi pemerintah, prinsip yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan dan seluruh personel instansi harus membuat komitmen untuk melakukan pengelolaan yang bertanggung jawab.

2. Harus ada sistem yang dapat memastikan penggunaan sumber daya secara konsisten sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Harus mampu menunjukkan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
4. Fokus pada realisasi visi dan misi serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh
5. Jujur, obyektif, transparan dan inovatif, untuk merubah manajemen instansi pemerintah berupa pemutakhiran metode dan teknologi pengukuran kinerja serta mempersiapkan akuntabilitas (Rahardjo, 2011)

#### **2.3.4 Dimensi Akuntabilitas**

Berikut beberapa dimensi akuntabilitas:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran, yaitu setiap kebijakan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan menjalankan aktivitas organisasi yang sehat untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
2. Akuntabilitas manajerial, yaitu pengelolaan kegiatan organisasi yang ekonomis, efektif dan efektif. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas proses dan implementasi rencana yang telah ditetapkan.
3. Akuntabilitas program, yaitu manajemen rencana yang mendukung tujuan organisasi, dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dan dampaknya.

4. Akuntabilitas kebijakan, yaitu mengelola dana masyarakat secara ekonomis, efektif dan efektif, serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan organisasi yang tidak efisien.
5. Akuntabilitas finansial, yaitu menghindari pemborosan, kebocoran dan korupsi, serta mempublikasikan hasil laporan keuangan kepada publik (Mardiasmo, 2004).

## **2.4 Konsep Pemberdayaan**

### **2.4.1 Pengertian Pemberdayaan**

Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdasarkan pengertian tersebut maka pemberdayaan bisa dimaknai sebagai suatu proses menuju budaya atau proses untuk memperoleh daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Sulistiyani, 2004)

Suhendra (2006) pemberdayaan merupakan kegiatan yang dinamis dan berkesinambungan yang mendorong seluruh potensi yang ada untuk berpartisipasi dalam semua potensi secara evolusioner secara kolaboratif.

Kreisber meyakini bahwa pada hakikatnya pemberdayaan memiliki dua ciri, pertama mewujudkan emansipasi akal budi dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan secara kolektif. Kedua, pemberdayaan adalah melibatkan individu atau komunitas dalam proses pencerahan, penyadaran, dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi. Pemberdayaan adalah upaya yang bertujuan untuk mengenali,

memahami kebijakan dan menggunakan keuntungan, menyelidiki bahwa masyarakat dapat mengatur atau mengontrol kehidupan, keterampilan dan posisi untuk menjadi peserta kunci dan efektif dalam masyarakat, termasuk proses pergantian kekuasaan..

Secara harfiah, dalam arti kekuasaan, tanggung jawab, dan kemampuan pribadi, istilah pemberdayaan bisa diartikan lebih mampu dari sebelumnya. Pemberdayaan adalah perubahan dalam filosofi manajemen yang membantu untuk menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat menggunakan kemampuan dan energinya untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, pemberdayaan dapat mendorong inisiatif dan respon, sehingga semua masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan fleksibel (Sedarmayanti 2014)

#### **2.4.2 Tahapan atau Proses Pemberdayaan**

Dalam proses pemberdayaan masyarakat diperlukan berbagai upaya terus menerus untuk melaksanakan tahapan atau proses yang membutuhkan pengorbanan yang serius dan berjangka panjang, termasuk tahapan yang akan membawa pemberdayaan kepada masyarakat dalam setiap tahapan proses pelaksanaan..

(Wrihatnolo, 2007) Pemberdayaan sebagai proses, pemberdayaan memiliki tiga tahapan diantaranya yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan

##### **1. Tahap Penyadaran**

Pada tahap ini, bentuk kesadaran pertama bahwa seseorang diberi pencerahan dan penyadaran bahwa mereka memiliki hak

untuk memiliki sesuatu. Jika tujuan pemberdayaan adalah orang miskin, maka mereka akan memahami bahwa jika mereka memiliki kemampuan untuk keluar dari kemiskinan, mereka bisa menjadi kelas menengah ke atas. Fase kognitif dapat dilakukan dengan memberikan kognisi, keyakinan, dan rehabilitasi. Oleh karena itu, target memahami bahwa mereka perlu diberi wewenang dan proses otorisasi dimulai dari dalam diri mereka.

## 2. Tahap Pengkapasitasan

Pada tahap ini, peningkatan kapasitas juga dapat disebut sebagai memampukan. Target pemberdayaan dituntut harus mampu terlebih dahulu sebelum diberdayakan. Oleh karena itu pada prinsipnya harus terlebih dahulu memberikan program perempuan untuk sarannya, sehingga sasaran tersebut memiliki pengetahuan atau keterampilan khusus, sehingga dapat mengelola sesuatu dalam menerima pemberdayaan. Proses pencapaian tujuan itu sendiri meliputi tiga jenis, yaitu: workshop, seminar, simulasi dan lain-lain. Intinya, ini untuk memberi individu dan orang kemampuan untuk menerima satu atau lebih kekuasaan yang akan diberikan.

## 3. Tahap Pendayaan

Pada tahap pendayaan, hal yang dilakukan dengan cara pemberian daya, kekuasaan, otoritas, serta peluang atau kesempatan kepada sasaran. Pemberian ini harus disesuaikan dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki sasaran.

Menurut penelitian literatur, proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yang pertama adalah

kecenderungan primer makna pemberdayaan yaitu proses pemberdayaan merupakan proses pemberdayaan yang menitikberatkan pada pemberdayaan atau pengalihan sebagian dari kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan sehingga individu menjadi lebih berdaya. Proses ini juga dapat dilengkapi dengan berbagai upaya, yaitu membangun aset material yang berguna untuk mendukung perkembangan kemandiriannya melalui organisasi. Kecendrungan kedua adalah kecendrungan sekunder, yang berfokus pada proses merangsang, mendorong atau memotivasi individu untuk menentukan pilihan hidup mereka sendiri melalui proses dialog.

Pemberdayaan dapat dilihat pada setiap orang dan masyarakat yang berpotensi untuk berkembang. Oleh karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya membangun potensi dengan memberikan motivasi dan kesadaran akan potensi yang dimiliki. (Padangaran, 2011) Ada tiga tahapan yang dilalui untuk sampai pada kondisi dimana masyarakat berdaya untuk mengembangkan dirinya sendiri, ketiga tahap itu adalah :

1. Tahap kesadaran, yaitu tahap di mana orang terinspirasi dan didorong untuk menyadari bahwa mereka berhak memiliki kemampuan dan menikmati hal-hal yang lebih baik.
2. Tahap peningkatan kapasitas atau memampukan adalah tahap di mana pengetahuan, keterampilan, fasilitas,



organisasi, sistem nilai atau aturan permainan diberikan kepada masyarakat.

3. Tahap pemberdayaan adalah tahap dimana masyarakat diberikan kesempatan atau kewenangan untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang telah dimilikinya untuk mengelola dan mengembangkan diri..

#### **2.4.3 Indikator Pemberdayaan**

Dalam hal ini indikator berperan dalam mengatur apakah pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik, sehingga diperlukan indikator. Ini masih sekedar perbandingan standar normatif dengan kenyataan yang ada. Jika gapnya kecil maka pemberdayaan masyarakat relatif berhasil, sebaliknya jika gap besar maka pemberdayaan masyarakat tidak berhasil. Melengkapi konsep pemberdayaan masyarakat dengan indikator yang dirinci pada karakteristik sasaran

Adapun indikator masyarakat yang berdaya diantaranya :

1. Memiliki potensi dalam menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber sumber yang ada di masyarakat
2. Dapat berjalannya proses “Bottom up planning”.
3. Kapabilitas dan kreativitas ekonomi.
4. Kemampuan menyiapkan hari depan keluarga.
5. Kemampuan dalam menyampaikan argumen dan aspirasi tanpa adanya tekanan (Hikmat, 2004)

Menurut pendapat Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan diantaranya ialah:

1. Kebebasan bergerak adalah kemampuan seseorang untuk keluar dari rumah atau tempat tinggal, seperti kemampuan pergi ke pasar, rumah ibadah, dan rumah tetangga. Dalam hal ini, jika individu tersebut mampu berjalan sendiri, mobilitasnya dianggap tinggi.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil adalah kemampuan individu untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh rumah tangga sehari-hari seperti beras minyak tanah, minyak nabati, bumbu dan keperluan seperti sabun mandi, bedak, sampo. Dalam hal ini, orang dianggap mampu melakukan kegiatan tersebut, terutama jika mereka dapat membuat keputusan sendiri tanpa persetujuan pasangannya dan apakah mereka dapat membeli barang tersebut dengan uangnya sendiri.
3. Kemampuan membeli komoditas besar adalah kemampuan individu untuk membeli komoditas sekunder atau tersier seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, dan pakaian rumah tangga. Sebagaimana indikator di atas, jika indikator di atas nilainya tinggi, mereka adalah individu yang dapat mengambil keputusan sendiri tanpa persetujuan

pasangannya, terutama apakah mereka dapat membeli barang tersebut dengan uangnya sendiri..

4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga yaitu mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, contohnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, memperoleh kredit usaha.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga yaitu informan ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan, dari mereka tanpa ijinnya yang melarang mempunyai anak atau melarang bekerja di luar rumah
6. Kesadaran hukum dan politik yaitu mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan diantaranya seorang DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes yakni seseorang dianggap berdaya jika mereka pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri, istri yang mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil dan penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.

8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga yaitu memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi apabila mereka memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

Menurut Sedarmayanti (2014) pengukuran pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan 4 (empat) dimensi yaitu kemampuan, kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab.

#### 1. Kemampuan

Di dalam kamus bahasa Indonesia, kemampuan berasal dari kata “mampu” yang berarti kuasa (bisa, sanggup, melakukan sesuatu, dapat, mempunyai harta berlebihan). Kemampuan adalah suatu kesanggupan dalam melakukan sesuatu. Diantara kemampuan tersebut yaitu:

1. Kemampuan mengidentifikasi. Pada tahap ini termasuk mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan dan mampu menjelaskan kausalitas kalimat.
2. Kemampuan mengevaluasi. Ini termasuk kemampuan untuk membedakan antara informasi yang relevan dan tidak relevan, mendeteksi pelanggaran dan mampu mengevaluasi pernyataan.
3. Kemampuan menyimpulkan. Ini termasuk pernyataan yang dapat menunjukkan benar dan salah, dan dapat membedakan antara fakta dan opini atau nilai pernyataan.

4. Kemampuan menyampaikan pendapat. Ini termasuk mampu memberikan alasan yang logis, mampu menunjukkan fakta yang mendukung sudut pandangnya, dan mampu memberikan ide-ide yang baik.

## 2. Kepercayaan

Moorman, dkk yang dikutip oleh Dharmmestha mendefinisikan kepercayaan sebagai kepercayaan seseorang pada kesediaan pihak lain untuk berpartisipasi dalam suatu transaksi karena ia memiliki kepercayaan pada pihak lain. Kepercayaan yang umumnya diharapkan orang adalah bahwa perkataan yang ingin dimunculkan individu dapat diandalkan dari orang lain. Kepercayaan adalah kepercayaan dan keyakinan pada pasangan pada pasangan. Ketika seseorang dipercaya untuk mengurus sesuatu, orang tersebut dikatakan terberdaya.

## 3. Wewenang

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata dengan kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, mengambil keputusan, mengatur, dan mendelegasikan tanggung jawab kepada orang / kelompok lain.. Dalam hal ini, keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat dapat dilihat apabila masyarakat yang diberikan tersebut diberikan suatu kewenangan untuk melakukan atau merumuskan sesuatu.

## 4. Tanggung Jawab

Burhanuddin (2000) menjelaskan bahwa tanggung jawab adalah kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan yang dilakukan. Seseorang yang terberdaya dituntut untuk mampu mengemban sebuah tanggung jawab yang diberikan padanya.

## **2.5 Pemberdayaan Perempuan**

Ihromi (2000) Pemberdayaan perempuan merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perempuan untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilannya untuk memperoleh dan menguasai, termasuk kedudukan, sumber daya dan struktur atau saluran pendukung pengambil keputusan. Pemberdayaan perempuan dapat ditingkatkan melalui proses penyadaran, diharapkan perempuan dapat menganalisis kondisi sosial secara kritis, memahami praktik-praktik diskriminatif yang membentuk masyarakat, dan dapat membedakan antara peran alam dan peran gender. Dengan memberikan informasi kepada perempuan dalam proses penyadaran, pendidikan, pelatihan dan motivasi, mereka dapat memahami identitas mereka, lebih percaya diri, dapat mengambil keputusan yang diperlukan, dapat menyatakan diri, memimpin, dan mendorong perempuan untuk mengubah dan memperbaiki situasi mereka, dengan demikian Dapatkan bagian yang lebih adil sesuai dengan nilai kemanusiaan universal

Inti dari strategi pemberdayaan sebenarnya tidak ditujukan untuk menciptakan perempuan yang lebih unggul dari laki-laki.

Meskipun metode pemberdayaan ini mengakui pentingnya kekuatan perempuan, pendekatan ini tidak hanya mencari kekuasaan perempuan dalam kerangka pemerintahan lainnya, tetapi juga berupaya untuk menentukan kekuatan wanita. Lebih dalam kerangka kemampuan perempuan untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal. Memang dalam upaya pemberdayaan perempuan, mereka berjuang untuk mewujudkan hak-hak perempuan, yaitu mereka dapat memilih hidup mereka dan mempengaruhi arah perubahan melalui kemampuan mereka untuk mengontrol sumber daya penting material dan non-material. Dalam metode pemberdayaan ini tidak menekankan pada pentingnya peningkatan status perempuan relatif terhadap laki-laki, tetapi upaya pemberdayaan perempuan dengan mendistribusikan kembali kekuasaan di dalam dan di antara masyarakat.

Nugroho (2008) menjelaskan untuk melakukan pemberdayaan perlu 3 langkah yang berkesinambungan:

1. Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus dipihaki daripada laki-laki
2. Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat
3. Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas.

Menurut Agustin Satyawati, pemberdayaan perempuan tidak berarti memaksakan kesetaraan antara laki-laki dan

perempuan di sektor publik, tetapi harus mendorong perempuan (dan laki-laki) untuk menjalin kerjasama dan sinergi antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan Kekuatan yang lebih besar. Kerjasama dan sinergi antara laki-laki dan perempuan di bidang keluarga dan masyarakat yang aman dan nyaman. Syarat untuk memberikan hak yang sama kepada perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki adalah bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban tersebut tercermin dalam kesempatan, kedudukan, dan peran. Sikap dan perilaku tersebut dilandasi oleh sikap dan sikap saling membantu dan mengisi seluruh bidang kehidupan. tingkah laku. Dalam proses pemberdayaan ini perlu digarisbawahi bahwa perempuan tidak bermaksud untuk mendominasi atau merebut kekuasaan dan menggunakan kekuasaan melalui eksploitasi dan aktivitas yang berlebihan, tetapi atas dasar kesetaraan dan tanggung jawab bersama, berbagi pengembangan diri kekuasaan secara demokratis.

Teori feminis Rosemerie berharap dapat meningkatkan harkat dan martabat perempuan sebagai manusia. Tujuan utamanya adalah menjadikan perempuan mandiri dengan menciptakan perempuan baru untuk perempuan dan mereformasi hal-hal yang tidak sesuai untuk perempuan.

Halik, dkk (2001) dalam pemberdayaan perempuan sektor informal bisa dianalisis dengan 5 (lima) dimensi diantaranya ialah

1. Dimensi kesejahteraan, secara sederhana, variabel dapat diukur dengan mengetahui apakah kebutuhan dasar (seperti



pangan, kesehatan, perumahan, dll) terpenuhi. Sejauh mana kebutuhan tersebut dapat dipenuhi tidak hanya dapat dinikmati oleh laki-laki, tetapi juga oleh perempuan.

2. Dimensi pemanfaatan sumber daya adalah variabel diketahui, dan mengukur perolehan modal, produksi, informasi, keterampilan, dll. Kesenjangan akses antara laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya akan menyebabkan perbedaan produktivitas di antara mereka
3. Dimensi penyadaran atau kesadaran kritis merupakan variabel yang diperlukan untuk mengetahui perlu tidaknya upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan kesenjangan gender yang disebabkan oleh faktor sosiokultural yang dapat berubah. Penyebab kesenjangan ini adalah perempuan diyakini memiliki status sosial ekonomi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.
4. Dimensi partisipasi adalah variabel yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan gender dalam partisipasi, yang dapat dilihat dari apakah pekerja perempuan terwakili dalam organisasi yang mewakili elit. Upaya pemberdayaan ditujukan untuk mengatur kegiatan perempuan agar dapat berperan dalam proses pengambilan keputusan dan mewakili kepentingannya.
5. Dimensi kontrol dalam variabel ini mengetahui apakah terdapat kesenjangan distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di semua bidang kegiatan.

Tujuan pemberdayaan perempuan itu sendiri adalah

1. Meningkatkan keterjangkauan (akses) perempuan kepada sumber dan manfaat pembangunan (modal, tanah, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan informasi)
2. Meningkatkan kesadaran perempuan mengenai diskriminasi gender, bahwa situasi perempuan dan perlakuan diskriminatif yang mereka terima bukanlah disebabkan oleh takdir ataupun karena kekurangan pada diri mereka sendiri, tetapi karena system sosial yang mendeksripsikan mereka.
3. Meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam pengambilan keputusan dalam keluarga masyarakat.
4. Meningkatkan penguasaan perempuan terhadap sumber dan manfaat pembangunan
5. Pembangunan perempuan bertujuan menjadikan perempuan mandiri dalam arti ekonomi, sosial budaya dan secara psikologi, program-program pembangunan disamping memenuhi kebutuhan gender praktis perempuan juga harus dapat memenuhi kebutuhan strategis (Ife, 2001).

### **2.5.1 Program Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi**

Dalam meningkatkan perekonomian perempuan di Indonesia, khususnya di pedesaan, perempuan memiliki keterbatasan dalam menjalankan kegiatan, seperti pendidikan rendah, keterampilan rendah, kurangnya kesempatan kerja, dan hambatan ideologis terkait keluarga perempuan. Hal ini membuat

peluang perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada menjadi sangat terbatas.

Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya perencanaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, karena secara fundamental perempuan memiliki potensi yang besar dalam perekonomian terutama dalam mengatur perekonomian keluarga.

Menurut (Nugroho, 2008) tujuan dari program pemberdayaan perempuan ialah :

1. Meningkatkan kemampuan perempuan untuk berpartisipasi aktif (utamanya) dalam perencanaan pembangunan sehingga tidak hanya menjadi sasaran pembangunan selama ini,
2. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan perempuan untuk meningkatkan posisi tawar menawar dan berpartisipasi dalam setiap pembangunan baik dalam bentuk perencana, pelaksana maupun kegiatan monitoring dan evaluasi.
3. Meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola usaha keluarga, industri kecil dan industri besar untuk mendukung kebutuhan keluarga yang terus berkembang dan memberikan kesempatan kerja yang produktif dan mandiri.
4. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan perempuan sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam program pembangunan di daerah tempat tinggalnya.

Di bidang ekonomi, lebih ditekankan pada pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kemampuan mengelola usaha, dalam hal ini khususnya untuk industri rumahan. Ada lima langkah penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pengembangan kemampuan berwirausaha bagi perempuan yaitu:

1. Membantu dan mendorong kaum perempuan untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan serta kompetensi diri mereka, melalui berbagai program pelatihan
2. Membantu kaum perempuan dalam strategi usaha dan pemasaran produk
3. Memberikan pemahaman terhadap regulasi dan peraturan pemerintah terkait dengan legalitas dunia usaha
4. Mendorong dan membantu kaum perempuan untuk mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal
5. Membuat Usaha Mikro/Jaringan Usaha Mikro Perempuan/ Forum Pelatihan Usaha.

Adapun program-program pemberdayaan perempuan yang ditawarkan menurut (Nugroho, 2008) adalah :

1. Penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat mulai dari kampung hingga nasional. Seperti misalnya PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), perkumpulan koperasi maupun yayasan sosial. Penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan

lembaga agar dapat berperan aktif sebagai perencana, pelaksana, maupun pengontrol,

2. Peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemasaran sosial program-program pemberdayaan. Hal ini penting mengingat selama ini program pemberdayaan yang ada, kurang disosialisasikan dan kurang melibatkan peran masyarakat,
3. Pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring semua program pembangunan yang ada. Keterlibatan perempuan meliputi program pembangunan fisik, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,
4. Peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan, agar mempunyai posisi tawar yang setara serta memiliki akses dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan,
5. Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha (skala industri kecil/rumah tangga hingga skala industri besar) dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas.

## 2.6 Teori Gender

### 2.6.1 Pengertian Gender

Fakih (2008) mendefinisikan gender sebagai karakteristik sosial dan struktural yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender dalam ilmu sosial diartikan sebagai model hubungan yang didasarkan pada karakteristik sosial laki-laki dan perempuan (Zainudin, 2006). Haspels (2005) mendefinisikan gender sebagai variabel sosial untuk menganalisis perbedaan gender dalam peran, tanggung jawab dan kebutuhan, serta peluang dan hambatan..

Istilah gender mengacu pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial dan budaya, yang terkait dengan sifat, status, dan peran kehidupan sosial. Gender mengacu pada perspektif atau pandangan manusia terhadap laki-laki dan perempuan yang tidak didasarkan pada perbedaan biologis gender. Dalam semua aspek kehidupan manusia, gender akan menimbulkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam kreasi sosial perempuan, dimana perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Misalnya, wanita dikenal karena kelembutan, kasih sayang, dan keibuan. Pada saat yang sama, laki-laki dianggap jantan, kuat, rasional dan berkuasa. Karakteristik dari fitur ini sendiri dapat dipertukarkan. Artinya sebagian laki-laki lembut, emosional, dan keibuan, sementara sebagian perempuan kuat, rasional dan berdaya (Hadiati, 2010)

### 2.6.2 Kesetaraan Gender

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan porsi dan siklus sosial laki-laki dan perempuan setara, keseimbangan dan harmonis dalam rasio laki-laki terhadap perempuan dan siklus sosial. Kesetaraan gender mencari bagaimana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk menyadari hak-hak mereka dan potensi mereka untuk berkontribusi pada pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dan berbahi manfaat dari pembangunan tersebut. Bentuk keadilan dan kesetaraan gender dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Menerima dan memahami dengan adil perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena menghormati perbedaan, termasuk beberapa bentuk ketidakadilan gender.
2. Mendiskusikan bagaimana mengubah struktur sosial yang membedakan peran dan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan bagaimana menyeimbangkannya.
3. Mempelajari kemampuan dan bakat setiap warga negara (terlepas dari laki-laki dan perempuan), berpartisipasi dalam pengembangan masyarakat, memecahkan masalah mereka dan mempersiapkan masa depan mereka.
4. Senantiasa memperjuangkan hak asasi manusia, dimana gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
5. Mengupayakan pengembangan dan penerapan demokrasi dan tata pemerintahan yang baik di semua lembaga

masyarakat dengan melibatkan perempuan di semua tingkatan.

6. Pendidikan adalah kunci untuk mencapai keadilan gender, karena pendidikan adalah tempat orang mentransfer norma, pengetahuan, dan kemampuannya

Menurut Sasongko (2009), terdapat beberapa aliran teori yang menjelaskan kesetaraan dan keadilan gender, yaitu: teori nurture, teori nature, dan keseimbangan dari kedua teori tersebut yang dikenal dengan teori equilibrium.

#### 1. Teori Nurture

Menurut teori nurture, perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan hasil konstruksi sosial dan budaya yang mengarah pada peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut membuat perempuan selalu tertinggal dalam kehidupan keluarga, komunitas, bangsa, dan negara, serta diabaikan oleh peran dan kontribusinya. Konstruksi sosial menempatkan laki-laki dan perempuan dalam perbedaan kelas. Laki-laki identik dengan borjuasi dan perempuan identik dengan proletariat

#### 2. Teori Nature

Menurut teori nature, perbedaan antara pria dan wanita adalah wajar dan oleh karena itu harus diterima. Perbedaan biologis memberikan tanda dan petunjuk, yang menunjukkan bahwa kedua jenis kelamin memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Beberapa peran dan tugas dapat dipertukarkan, tetapi beberapa tidak dapat, karena keduanya secara inheren berbeda.



### 3. Teori Equilibrium

Selain kedua aliran tersebut, terdapat kompromistis yang disebut keseimbangan (equilibbrium), yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pandangan ini tidak mengandung konflik antara laki-laki dan perempuan, karena keduanya harus hidup dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, komunitas, suku dan bangsa.

#### 2.6.3 Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan gender adalah sebuah sistem dan struktur, dan baik laki-laki maupun perempuan adalah korban dari sistem ini. Ketidaksetaraan gender terjadi di semua bidang kehidupan, yaitu negara, masyarakat, organisasi atau tempat kerja, keluarga dan wilayahnya sendiri.

Menurut (Sasongko, 2009) bentuk-bentuk ketidak-adilan akibat diskriminasi gender antara lain sebagai berikut:

1. Marginalisasi (peminggiran/pemiskinan) perempuan yang mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi dalam masyarakat di negara berkembang seperti penggusuran dari kampung halaman, eksploitasi, banyak perempuan tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan seperti intensifikasi pertanian yang
2. Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa satu jenis kelamin lebih atau lebih penting daripada yang lain.

Ada yang berpandangan bahwa wanita lebih rendah dari pria

3. Stereotip adalah label yang biasanya bersifat negatif dan selalu melahirkan ketidakadilan jenis kelamin tertentu.
4. Kekerasan mengacu pada serangan fisik atau non fisik yang diderita oleh pria dan wanita, menyebabkan tekanan mental pada orang yang berpengalaman.
5. Beban kerja (beban ganda) yang merupakan salah satu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender, sebagian beban kegiatan lebih banyak ditanggung oleh satu jenis kelamin.

### **2.7 Penelitian Terkait**

Penelitian mengenai alokasi dana desa bukan sebuah penelitian yang baru, banyak peneliti-peneliti terdahulu yang telah meneliti, pengaruh, peranan, dan menganalisis mengenai dampak pengalokasian dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan. Penelitian- penelitian tersebut antara lain, sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

No	Penelitian dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rika Ardiyanti (2019) “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang”	Kuantitatif	Transparansi dan akuntabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat	Penelitian menggunakan 3 variabel bebas dan variabel terikat dari penelitian ini yaitu masyarakat secara umum
2	Rina, dkk (2018) “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat ( Studi Kasus di Desa Pundungsari Kecamatan	Kuantitatif	Variabel akuntabilitas dalam ADD mempunyai pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat	Dalam penelitian ini variabel akuntabilitas mempunyai pengaruh yang negatif

Lanjutan Tabel 2.1

2	Tempursari Kabupaten Lumajang”			
3	Rizki Amalia Sugista (2017) “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa”	Kuantitatif	Transparansi dan akuntabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan	Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh variabel bebas terhadap pembangunan desa secara umum
4	Weny Ultafitah (2017) “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat”	Kuantitatif	Akuntabilitas dan Transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan	Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh variabel x dalam mewujudkan good governance
5	Dewi & Ratih (2020) “Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan	Kuantitatif	Variabel transparansi mempunyai pengaruh positif terhadap variabel terikat	Variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat

Lanjutan Tabel 2.1

	Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo”			
6	Rochmayanti (2015) “Pemberdayaan Perempuan Melalui Alokasi Dana Desa (Studi tentang Peran PKK di Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)	Kualitatif	Penelitian ini mengkaji tentang pemberdayaan perempuan secara khusus	Selain perbedaan metode penelitian, penelitian ini menggunakan tentang peran PKK dalam memberdayakan perempuan

### 2.7.1 Pengaruh Transparansi Dalam Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Perempuan

Transparansi adalah terbuka mengenai informasi kepada publik, dan apabila publik membutuhkan informasi tersebut, maka publik akan segera mendapatkannya. Dengan adanya keterbukaan tersebut, dana desa yang dikelola dapat dikontrol dan diawasi dengan baik oleh pihak yang berwenang. Sehingga, dana desa yang penggunaannya bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan dapat terserap dengan baik.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Ardiyanti pada tahun 2019 dengan judul pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang membuktikan bahwa pengelolaan alokasi dana desa dengan indikator transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian yang dilaksanakan oleh Erni Tahrir pada tahun 2018 dengan judul pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menyatakan bahwa transparansi secara signifikan berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat desa.

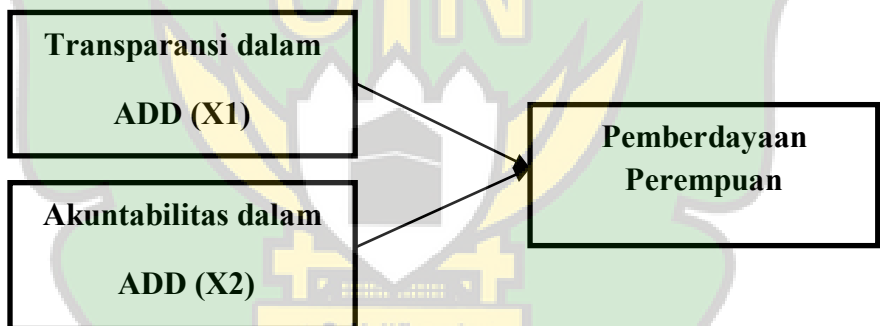
### **2.7.2 Pengaruh Akuntabilitas Dalam Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Perempuan**

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pemerintah desa selaku pelaku administrasi, dan juga selaku pengelola dana desa tersebut. Pelaksanaan akuntabilitas dalam pengalokasian dana desa harus dilakukan karena mengacu pada tujuan adanya dana desa, yaitu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan. Dengan adanya pemikiran tersebut, Rina Indrawati Syafi'i, dkk pada tahun 2018 melaksanakan penelitian tentang dengan judul pengaruh akuntabilitas keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat memperoleh kesimpulan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan

masyarakat di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang.

## 2.8 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topic yang akan dibahas. Program pemberdayaan perempuan merupakan program pemerintah desa dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan di desa. Tujuannya adalah untuk memberdayakan perempuan desa untuk berkreaitifitas dan menciptakan karya (Sopian, 2019).



Gambar 2.1: Kerangka berpikir

## 2.9 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah digambarkan diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha 1: Transparansi dalam alokasi dana desa mempunyai pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan perempuan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Ha 2: Akuntabilitas dalam alokasi dana desa mempunyai pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan perempuan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh





## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Rancangan Penelitian**

penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan menggunakan angka-angka dan menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau hingga sekarang. Selain sebagai penelitian yang berbasis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (*field research*), karena penelitian ini dilaksanakan di lapangan dalam lingkup kehidupan yang sebenarnya (Sarmanu, 2017). Dalam pelaksanaannya, *field research* dilaksanakan dengan menggali data dari lokasi atau lapangan penelitian, yaitu responden yang ada di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2009). Data primer diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh sampel penelitian.

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia, sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2009). Data sekunder diperoleh dari data yang telah dipublish oleh pemerintah atau pihak tertentu.

### 3.3 Populasi dan Sampel

Sugiyono (2009) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk perempuan dalam usia produktif di kecamatan Syiah Kuala yang berjumlah 14.961 orang (BPS, 2019)

Sugiyono (2009) Sampel adalah sebagian dari populasi itu. Cara pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu suatu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Diantara kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Memiliki pemahaman tentang dana desa dengan rentang umur 17-55 tahun
2. Mendapat manfaat dari dana desa
3. Berjenis kelamin perempuan

Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus *Slovin* :

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

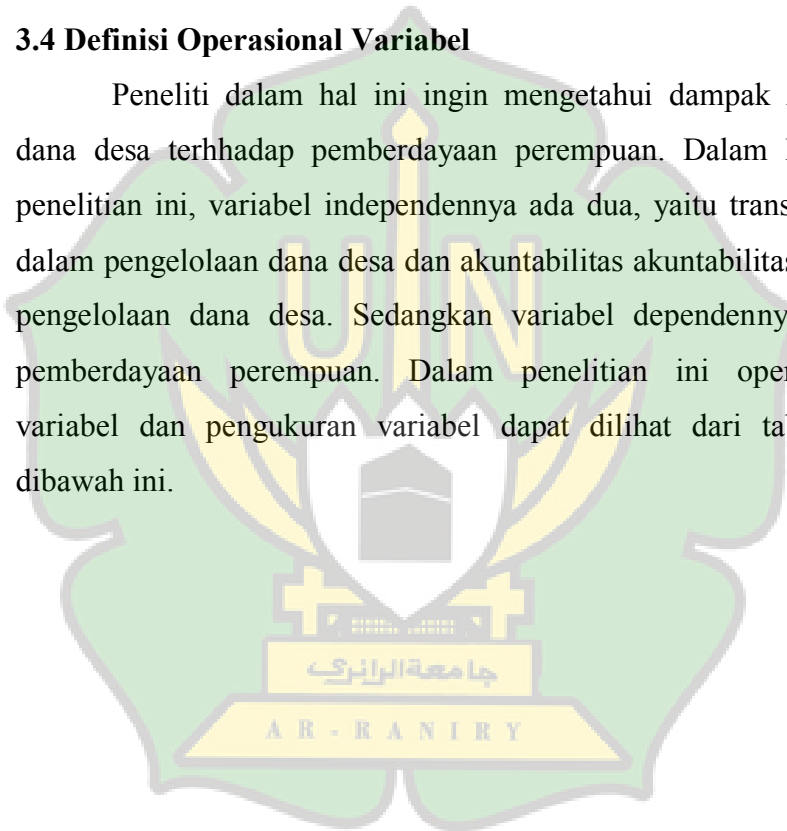
e : Nilai kritis yang ditoleransi sebesar 10%

Dari rumus di atas dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang ada dalam penelitian ini adalah sebesar :

$n = 14.961/1 + 14.961(0,1^2) = 99,336$  digenapkan jadi 99 orang.

### **3.4 Definisi Operasional Variabel**

Peneliti dalam hal ini ingin mengetahui dampak Alokasi dana desa terhadap pemberdayaan perempuan. Dalam konteks penelitian ini, variabel independennya ada dua, yaitu transparansi dalam pengelolaan dana desa dan akuntabilitas akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan variabel dependennya yaitu pemberdayaan perempuan. Dalam penelitian ini operasional variabel dan pengukuran variabel dapat dilihat dari table 3.1 dibawah ini.



**Tabel 3.1**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
Transparan (X1)	Transparan adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan, dan pertanggungjawaban</li> <li>b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat</li> <li>c. Keterbukaan dalam pengelolaan</li> <li>d. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan ADD</li> </ul>	Menggunakan skala <i>linkert</i> 1-5 dengan teknik agree-disagree scale
Akuntabilitas (X2)	Akuntabilitas adalah oertanggung jawaban tim pelaksana pengelolaan ADD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan ADD</li> <li>b. Adanya pengawasan oleh tim Pelaksana</li> <li>c. Adanya laporan</li> </ul>	Menggunakan skala <i>linkert</i> 1-5 dengan teknik agree-disagree scale

Tabel Lanjutan 3.1

		<p>pertanggungj awaban pengelolaan ADD</p> <p>d. Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan ADD</p>	
Pemberdayaan Perempuan	<p>Pemberdayaan perempuan adalah suatu upaya dalam peningkatan kemampuan perempuan dalam mengembangka n kapasitas dan keterrampilanny a untuk meraih akses dan penguasaan, antara lain yaitu posisi pengambil keputusan, sumber-sumber dan struktur atau jalur yang menunjang</p>	<p>a. Kemampuan b. Kepercayaan c. Wewenang d. Tanggungja wab Sedarmayant i (2014)</p>	<p>Menggunak an skala <i>linkert</i> 1-5 dengan teknik agree- disagree scale</p>

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2009) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan metode-metode antara lain sebagai berikut:

#### 1. Metode Observasi (Pengamatan)

Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung (Rumudi, 2012).

#### 2. Metode Angket (Kuesioner)

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan suatu daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi (Rumudi, 2012).

Kuesioner adalah cara mengumpulkan data dengan mengirim kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepada orang yang menjadi sampel penelitian sehingga jawabannya tidak langsung diperoleh. Jenis kuesioner dari penelitian ini adalah jenis tertutup karena sudah disediakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, pendistribusian kuesioner diratakan di setiap desa yang ada di Kecamatan Syiah Kuala.

### 3.5.1 Skala Pengukuran Data

Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner bersifat kualitatif akan diubah menjadi bentuk kuantitatif dengan pendekatan analisis statistik. Adapun secara umum teknik dalam pemberian skor yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah teknik Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2009).

Kuesioner akan disebar dilengkapi dengan 4 alternatif jawaban, masing-masing diberi skor yaitu:

SS	= Sangat setuju	diberi nilai 5
S	= Setuju	diberi nilai 4
KS	= Kurang Setuju	diberi nilai 3
TS	= Tidak Setuju	diberi nilai 2
STS	= Sangat Tidak Setuju	diberi nilai 1

## 3.6 Teknik Analisis Data

### 3.6.1 Model Penelitian

#### 1. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah analisis regresi dimana variabel dependen (Y) dijelaskan dan/atau dihubungkan oleh lebih dari satu variabel independen (X) dengan syarat variabel independen tersebut harus linear. Secara matematis model analisis regresi linier berganda dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana:

- Y : Variabel dependen
- $\alpha$  : Konstanta
- $\beta_1$  : Koefisien regresi X1
- $\beta_2$  : Koefisien regresi X2
- X1 : Variabel independen 1
- X2 : Variabel Independen 2
- e : Error term

Model regresi dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Pemper} = \alpha + \beta_1 \text{ Trans} + \beta_2 \text{ Akun} + e$$

Dimana:

- Pemper : Pemberdayaan perempuan
- $\alpha$  : Konstanta
- $\beta_1$  : Koefisien regresi transparansi
- $\beta_2$  : Koefisien regresi akuntabilitas
- Trans : Transparansi
- Akun : Akuntabilitas
- e : Error them

### 3.6.2 Uji Coba Instrumen

#### 1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak sahnya suatu kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Jika r hitung  $>$  r tabel, maka item-item pertanyaan dinyatakan valid dan sebaliknya,



jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka item-item pertanyaan dinyatakan tidak valid. Software yang digunakan untuk uji validaitas dalam penelitian ini adalah menggunakan Microsot Excel

## 2. Uji Reliabilitas

Selain uji validitas, dilakukan juga uji reliabilitas kepada keseluruhan sampel. Uji reliabilitas dilakukan pada butir-butir pernyataan yang telah valid. Teknik untuk menguji reliabilitas instrumen yaitu dengan menggunakan metode *cronbach's alpha* dimana variabel tersebut akan dinyatakan reliable dengan ketentuan, jika nilai reliabilitas kurang dari 0,6 maka nilainya kurang baik. Artinya adalah bahwa alat ukur yang digunakan tidak reliable.

### 3.6.3 Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Dalam pengambilan keputusan normalitas, penelitian ini mengacu pada hasil dari grafik histogram dan table p-p plot, serta uji statistic One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi  $>$  0,05 (Ghozali, 2011).

#### 2. Uji Multikolineritas

Uji Multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model penelitian ditemukan korelasi antar variabel independen. Oleh karena itu, uji ini penting untuk dilakukan supaya tidak terjadi keterkaitan antar variabel independen.

Pengambilan keputusan normalitas mengacu pada nilai tolerance dan VIF. Dasar dari pelaksanaan uji ini adalah jika nilai tolerance  $> 0,1$  dan VIF  $< 10$ , maka variabel independen dalam suatu penelitian tidak terjadi multikolineritas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan uji heteroskedastisitas, yaitu uji grafik plot, uji park, uji glejser, uji white, dan membandingkan nilai residual unstandardized dengan nilai sig. Jika nilai sig  $> 0,05$  maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

#### 3.6.4 Pengujian Hipotesis

Setelah melakukan analisis, maka hasilnya akan diuji dalam pengujian hipotesis yang digunakan untuk menentukan dugaan sementara dari hasil penelitian. Sugiyono (2009) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Pengujian hipotesis dapat diketahui dengan melakukan uji t (parsial) untuk melihat apakah transparansi dan akuntabilitas dalam

alokasi dana desa secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan perempuan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Suatu variabel dikatakan mempunyai pengaruh yang signifikan jika  $t \text{ hitung} > t \text{ table}$  atau nilai signya  $< 0,05$ .

Pengujian hipotesis juga dapat diketahui dengan melakukan uji  $f$  (simultan) untuk melihat apakah transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi dana desa secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan perempuan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Dikatakan mempunyai pengaruh yang signifikan jika  $f \text{ hitung} > f \text{ table}$  atau nilai signya  $< 0,05$ .

### **3.6.5 Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi (R Square) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variabel dependen. Koefisien determinasi dapat menginterpretasikan sejauh mana keeratan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Nilai R square yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan keterkaitannya dengan variabel dependen sangat terbatas. Semakin besar nilai R Square berarti semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen.

**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**  
**4.1 Gambaran Umum Kecamatan Syiah Kuala**

**4.1.1 Luas Desa Kecamatan Syiah Kuala**

Kecamatan Syiah Kuala terdiri atas 3 kemukiman, 10 desa, dan 41 dusun. Dengan jumlah desa yang banyak, tentu dibarengi juga dengan wilayah yang luas. Dari 10 desa yang ada di kecamatan Syiah Kuala, Alue Naga merupakan desa dengan wilayah desa yang terluas yaitu mencapai 242,6 Ha.

**Tabel 4.1**  
**Data luas desa kecamatan Syiah Kuala Menurut Desa**  
**Tahun 2018**

Desa	Luas Desa(Ha)
Ie Masen Kayee Adang	70,2
Pineung	61,5
Langugob	153,2
Kopelma Darussalam	206,2
Rukoh	95,2
Jeulingke	154,4
Tibang	230,7
Deah Raya	178,2
Alue Naga	242,6
Peurada	31,79

Sumber: Kecamatan Syiah Kuala Dalam Angka Tahun 2019

**4.1.2 Batas-Batas Desa Kecamatan Syiah Kuala**

Batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Penetapan dan penegasan batas wilayah sebuah desa harus menjadi prioritas pemerintah karena jika batas wilayah tidak jelas, selain bisa menghambat proses pembangunan di desa dan berpotensi terjadinya konflik antar warga.

Tujuan penetapan dan penegasan batas desa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

**Tabel 4.2**  
**Batas-Batas Desa Dalam Kecamatan Syiah Kuala**  
**Tahun 2017**

Desa	Batas
Ie Masen Kayee Adang	Utara : Desa Pineung Timur : Kabupaten Aceh Besar Selatan : Desa Doy Barat : Desa Lambhuk
Pineung	Utara: Desa Peurada Timur : Desa Lamgugob Selatan : Desa Ie Masen Kayee Adang Barat : Desa Kota Baru Kec. Kuta Alam
Lamgugob	Utara : Desa Jeulingke Timur : Desa Rukoh Selatan : Desa Ie Masen Kayee Adang Barat : Desa Pineung
Kopelma Darussalam	Utara : Desa Rukoh Timur : Kabupaten Aceh Besar Selatan : Kabupaten Aceh Besar Barat : Kabupaten Aceh Besar
Rukoh	Utara : Kabupaten Aceh Besar Timur : Kabupaten Aceh Besar Selatan : Desa Kopelma Darussalam Barat : Desa Lamgugob

**Lanjutan Tabel 4.1**

Jeulingke	Utara : Desa Tibang Timur : Kabupaten Aceh Besar Selatan : Desa Peurada Barat : Desa Bandar Baru Kec.Kuta Alam
Tibang	Utara : Desa Alue Naga Timur : Kabupaten Aceh Besar \\ Selatan : Desa Jeulingke Barat : Desa Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam
Deah Raya	Utara : Selat Malaka Timur : Desa Alue Naga Selatan : Desa Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Barat : Desa Lampulo Kec. Kuta Alam
Alue Naga	Utara : Selat Malaka Timur : Kabupaten Aceh Besar Selatan : Desa Tibang Barat : Desa Deah Raya
Peurada	Utara : Desa Jeulingke Timur : Desa Lamgugob Selatan : Desa Pineung Barat : Desa Kota Baru Kec. Kuta Alam

Sumber: BPS (2018)

#### **4.1.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Syiah Kuala**

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Penduduk terbanyak di kecamatan Syiah Kuala terdapat di desa Jeulingke yaitu mencapai 6567 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 3448 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3119

jiwa. Deah Raya merupakan desa dengan penduduk paling sedikit di kecamatan Syiah Kuala yaitu sebanyak 1023 jiwa. Jika dibandingkan dengan penduduk Jeulingke, jumlah penduduk Deah Raya tidak mencapai setengah dari penduduk perempuan desa Jeulingke.

**Tabel 4.3**  
**Data Jumlah Penduduk kecamatan Syiah Kuala**  
**Tahun 2017**

<b>Desa</b>	<b>laki-laki</b>	<b>perempuan</b>	<b>Total</b>
Ie Masen Kayee Adang	3347	2178	4415
Pineung	2228	2161	4389
Lamgugob	2290	2113	4403
Kopelma Darussalam	2149	2579	4728
Rukoh	2704	2479	5183
Jeulingke	3448	4119	6567
Tibang	811	704	1515
Deah Raya	551	472	1023
Alue Naga	896	732	1629
Peurada	1652	1690	3342

Sumber: BPS (2018)

#### **4.1.4 Visi Misi Kecamatan Syiah Kuala**

Adapun visi Kecamatan Syiah Kuala adalah “Mewujudkan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Syiah Kuala yang madani melalui pembenahan ekonomi desa dan kualitas pelayanan administrasi pemerintah”

Misi dari Kecamatan Syiah Kuala adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan administrasi pemerintah terpadu melalui profesionalitas aparatur kecamatan.

2. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam membenahan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi melalui pembinaan dan sosialisasi potensi kecamatan disegala bidang.

#### **4.2 Penerimaan Dana Desa Kecamatan Syiah Kuala**

Sejak diberikan dana desa pada tahun 2015-2019, terdapat perbedaan jumlah desa yang tersebar sebagai penerima dana desa. Dana desa sendiri digubakan untuk membangun desa baik untuk pembangunan fisik desa maupun untuk pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa yang diberikan dalam jumlah besar diharapkan mampu dikelola dengan baik guna tercapainya tujuan dari pemberian dana desa itu sendiri.

Syiah Kuala merupakan salah kecamatan di Kota Banda Aceh yang semua desa nya mendapat jatah dana desa dari pemerintah pusat. Jumlah dana desa yang diterima di kecamatan Syiah juga bervariasi. Hal ini tergantung dari tingkat kebutuhan desa juga jumlah penerimaannya dipengaruhi oleh bsarnya jumlah penggunaan tahun sebelumnya. Jika pada tahun sebelumnya dana desa yang diberikan tidak habis digunakan (silpa) maka untuk tahun deoannya jumlah dana desa yang diterima desa tersebut akan dipotong.

Dana desa paling besar adalah desa Alue Naga yaitu senilai Rp984.910.447. hal ini dikarenakan desa Alue Naga masih sangat tertinggal pembangunan desanya dibandingkan dengan desa lain



yang ada di kecamatan Syiah Kuala. Ini dapat kita lihat dari kondisi desa yang masih sangat membutuhkan pembangunan fisik.

**Tabel 4.4**  
**Daftra Realisasi Alokasi Dana Desa Kecamatan Syiah Kuala**  
**Tahun 2015-2019**  
(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Desa	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Jeulingke	631.018	800.687	729.318	849.551
2	Tibang	616.776	783.207	720.633	912.749
3	Deah Raya	620.453	787.720	727.613	853.162
4	Alue Naga	621.293	788.752	723.636	984.910
5	Ie Masen Kaye Adang	627.560	796.443	716.444	837.117
6	Pineung	620.695	788.017	696.612	795.183
7	Lamgugob	612.935	778.492	681.576	798.670
8	Kopelma Darussalam	626.426	795.051	721.875	819.455
9	Rukoh	643.704	816.258	750.771	835.412
10	Peurada	622.279	789.961	694.620	787.194

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh

### 4.3 Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Syiah Kuala

Pada umumnya, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembagunan dan pemberdaan masyarakay yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa.

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana desa dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Penggunaan dana desa di kecamatan Syiah Kuala umumnya digunakan untuk kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggaraan pemerintah desa, dan pembinaan masyarakat. Disamping itu juga ada hal-hal lain yang menjadi kepentingan dalam penggunaan dana desa.

#### **4.4 Hasil Penelitian**

##### **4.4.1 Karakteristik Responden**

Penjabaran karakteristik responden bertujuan untuk menerangkan mengenai karakteristik dari masing-masing responden dalam penelitian ini. Dengan penjabaran tersebut diharapkan peneliti dapat dengan mudah mengklasifikasikan responden sehingga dengan mudah membantu peneliti dalam menganalisis responden berdasarkan karakteristiknya.

##### **1. Usia**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kuesiner, maka diperoleh responden dengan kelompok usia sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

<b>Kelompok Usia</b>	<b>Jumlah Responden (orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
17-25	64	64,65 %
26-35	20	20,20 %
36-45	13	13,13 %
46-55	2	2,02 %
<b>Jumlah</b>	<b>99</b>	<b>100%</b>

Sumber : data primer (2020)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat klasifikasi umur responden yang memudahkan untuk melakukan klasifikasi dan analisis responden berdasarkan umur. Di mana, karakteristik responden berdasarkan umur menunjukkan bahwa 64,65% responden pada penelitian ini memiliki umur dari 17 hingga 25 tahun, selanjutnya 20,20% berumur 26 hingga 35 tahun, 13,13% berada di rentang usia lebih dari 36 sampai 45 tahun, dan sisanya sebesar 2,02% memiliki usia pada rentang 46 hingga 55 tahun.

## 2. Pendidikan Terakhir

Berdasarkan hasil penelitian, kelompok pendidikan responden adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Terakhir**

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah Responden (orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
SD	6	6,06 %
SMP	9	9,10 %
SMA	54	54,54 %
D3/S1	30	30,30%
Jumlah	99	100%

Sumber : data primer (2020)

#### **4.4.2 Validitas dan Reabilitas**

##### **1. Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid tidaknya butir-butir pertanyaan yang telah disusun dalam kuisisioner penelitian. Sehingga dengan uji validitas peneliti dapat memastikan butir-butir dalam instrument tersebut benar-benar valid atau tidak sehingga akan menghasilkan yang baik dan tidak biasa.

**Tabel 4.7**  
**Uji Validitas**

<b>Varibel</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>r Hitung</b>	<b>r Tabel</b>	<b>Validitas</b>
Transparansi	P1	0,843	0.197	Valid
	P2	0,260	0.197	Valid
	P3	0.368	0.197	Valid
	P4	0.578	0.197	Valid
Akuntabilitas	P1	0.828	0.197	Valid
	P2	0.326	0.197	Valid
	P3	0.465	0.197	Valid
Pemberdayaan Perempuan	P1	0.706	0.197	Valid
	P2	0.769	0.197	Valid
	P3	0.761	0.197	Valid
	P4	0.784	0.197	Valid
	P5	0.725	0.197	Valid
	P6	0.673	0.197	Valid
	P7	0.698	0.197	Valid
	P8	0.715	0.197	Valid
	P9	0.691	0.197	Valid

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas ditunjukkan bahwa butir-butir pertanyaan atau indikator pertanyaan dalam instrumen penelitian ini adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan nilai r hitung pada indikator lebih besar dari nilai r tabel yang menunjukkan bahwa indikator dalam penelitian ini adalah valid

## 2. Uji Reliabilitas

Dalam hal ini fasilitas yang diberikan oleh SPSS adalah dapat mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Jika koefisien *Cronbach Alpha* > 0,60 maka instrument tersebut dapat dikatakan handa. Sedangkan, jika koefisien *Cronbach Alpha*

yang  $< 0,60$  maka instrumen tersebut dapat dikatakan kurang handal.

**Tabel 4.8**  
**Uji Reliabilitas**

<b>Variabel</b>	<b>Cronbach's Alpha</b>	<b>Pembanding</b>	<b>Reliabilitas</b>
Transparansi	0.728	0.60	Reliabel
Akuntabilitas	0.751	0.60	Reliabel
Pemberdayaan Perempuan	0.887	0.60	Reliabel

Sumber : Data diolah (2020)

#### **4.4.3 Uji Asumsi Klasik**

##### **1. Uji Normalitas**

Uji normalitas ini digunakan untuk menguji apakah model regresi dan variabel residual mempunyai distribusi yang normal. Dalam menentukan uji selanjutnya, nilai residual haruslah normal, karena jika nilai residual tersebut tidak normal, maka uji statistik akan menjadi tidak valid. Dalam hal ini, pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan software SPSS yakni dengan melihat nilai Kolmogorov-Smirnov Test, histogram, dan p-plot.

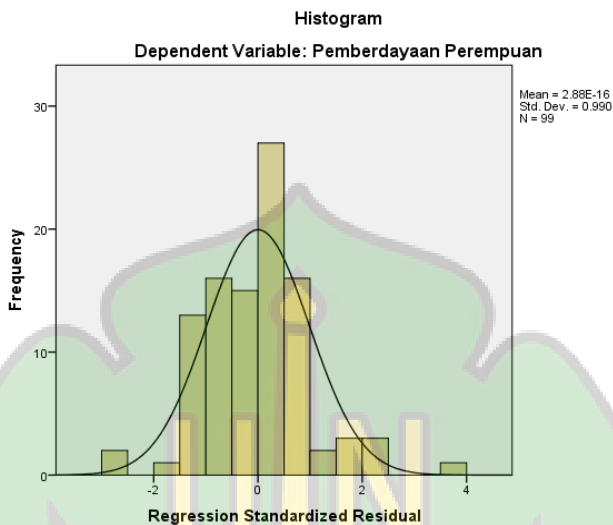
**Tabel 4.9**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.85728362
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.072
	Positive	.072
	Negative	-.057
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada uji *kolmogrov smirnov* adalah 0,200 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi secara normal.

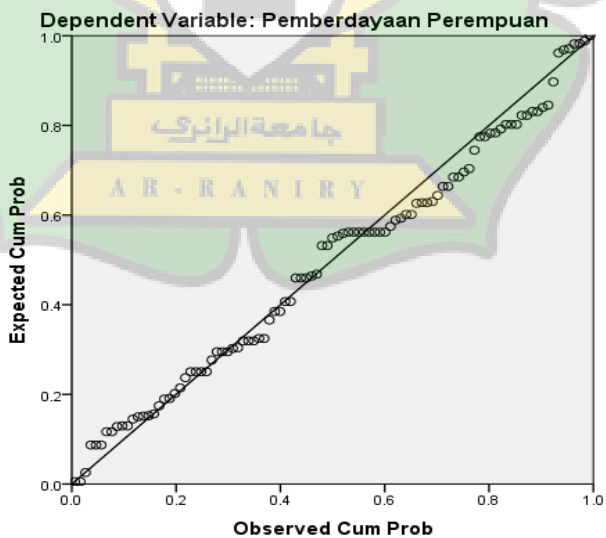
**Gambar 4.1**  
**Grafik Histogram**



Sumber: Data diolah (2020)

**Gambar 4.2**  
**Normal P-P Plot Test**

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data diolah (2020)



Pada gambar 4.1 dan 4.2 tampilan grafik histogram, distribusi data membentuk lonceng (*bell shaped*), tidak condong ke kiri atau condong ke kanan sehingga data dengan pola seperti ini memiliki distribusi normal. Dengan melihat grafik histogram maupun grafik *normal pplot*, dapat disimpulkan grafik histogram memberikan pola yang seimbang. Sedangkan pada grafik *normal p plot* terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi sesuai dengan asumsi normalitas dan layak digunakan.

## 2. Uji Multikolineritas

Uji Multikolineritas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas (independen) dalam suatu model regresi.

**Tabel 4.10**  
**Uji Multikolineritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics			
	B	Std. Error	Tolerance	VIF
(Constant)	4.350	1.497		
Transparansi	.648	.234	.436	2.292
Akuntabilitas	1.310	.261	.436	2.292

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Perempuan  
Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan hasil dari uji multikolinieritas yang dilihat dari table diatas, dapat diketahui bahwa setiap variabel independen memiliki nilai VIF <10 atau nilai tolerance >0,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian yang dilakukan ini tidak terdapat hubungan multikolinieritas antar variabel independen

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan.

**Tabel 4.11**  
**Uji Heteroskedastisitas**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	32.451	2	16.226	2.707	.072 <sup>b</sup>
Residual	575.364	96	5.993		
Total	607.815	98			

a. Dependent Variable: RESID

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan table diatas, dapat dipastikan bahwa penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas karena nilai sig dari residual > 0,05 (0,72 > 0,05)

#### 4.4.4 Regresi Linier Berganda

Pengujian data dengan menggunakan model analisis bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini pengujian model analisis regresi linier berganda dilakukan dengan menggunakan alat analisis SPSS versi 22.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.350	1.497		2.906	.005
Transparansi	.648	.234	.283	2.763	.007
Akuntabilitas	1.310	.261	.513	5.016	.000

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Perempuan

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel di atas dapat dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$\text{Pemper} = 4,350 + 0,648 \text{ Trans} + 1,310 \text{ Akun} + e$$

Interpretasi:

1. Tanpa dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi dana desa, pemberdayaan perempuan berjumlah 4,350.
2. Transparansi dalam alokasi dana desa ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhadap pemberdayaan perempuan ( $Y$ ). Artinya apabila peningkatan transparansi dalam alokasi dana desa naik sebesar

1 satuan maka akan berdampak pada peningkatan pemberdayaan perempuan sebesar 0,648 satuan

3. Akuntabilitas dalam alokasi dana desa ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhadap pemberdayaan perempuan ( $Y$ ). Artinya apabila peningkatan akuntabilitas dalam alokasi dana desa naik sebesar 1 satuan maka akan berdampak pada peningkatan pemberdayaan perempuan sebesar 1,310 satuan

#### **4.4.5 Pengujian Hipotesis**

##### **1. Uji t (Parsial)**

Uji t (uji parsial) dalam model analisis regresi linier berganda bertujuan untuk melihat tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau secara satu per satu pada masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun pengujian dilakukan dengan membandingkan antara  $t$  hitung dan  $t$  tabel dan juga dengan membandingkan nilai sig dengan nilai alpha yang digunakan dalam penelitian ini. Suatu variabel bebas dikatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat apabila nilai sig  $< 0,05$ . Uji t juga bias dilihat dengan membandingkan nilai  $t$  hitung dengan nilai  $t$  tabel dengan syarat nilai  $t$  hitung  $> t$  table

**Tabel 4.13**  
**Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.350	1.497		2.906	.005
Transparansi	.648	.234	.283	2.763	.007
Akuntabilitas	1.310	.261	.513	5.016	.000

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Perempuan  
Sumber: Data diolah (2020)

Dari table diatas, dapat didimpulkan bahwa:

1. Transparansi dalam alokasi dana desa memiliki pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan perempuan karena nilai sig dari transparansi  $< 0,05$  ( $0,007 < 0,05$ ). Berdasarkan perbandingan nilai t hitung pada transparansi sebesar 2,763 lebih besar ( $>$ ) daripada nilai t tabel sebesar 1,985 yang berarti bahwa transparansi dalam alokasi dana desa mempunyai pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan perempuan
2. Akuntabilitas dalam alokasi dana desa memiliki pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan perempuan karena nilai sig dari akuntabilitas  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ). Berdasarkan perbandingan nilai t hitung pada akuntabilitas sebesar 5,016 lebih besar ( $>$ ) daripada nilai t table sebesar 1,985 yang berarti bahwa akuntabilitas dalam alokasi dana desa

mempunyai pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan perempuan

## 2. Uji F (Simultan)

Uji F bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel independen secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Syarat variabel bebas dikatakan mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap terhadap variabel terikat apabila nilai sig < 0,05. Uji f juga bias dilihat dengan membandingkan nilai f hitung dengan nilai f tabel dengan syarat nilai f hitung > f tabel.

**Table 4.14**  
**Uji F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1866.217	2	933.108	61.435	.000 <sup>b</sup>
Residual	1458.106	96	15.189		
Total	3324.323	98			

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Perempuan

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

Sumber: Data diolah (2020)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat karena nilai sig < 0,05 (0,000 < 0,05). Berdasarkan perbandingan nilai f sebesar 61,435 lebih besar (>) daripada nilai f table sebesar 3,09 yang berarti bahwa transparansi akuntabilitas

dalam alokasi dana desa secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan perempuan

#### 4.4.6 Uji R Square (koefisien Determinasi)

Uji R Square (koefisien Determinasi) bertujuan untuk melihat bagaimana kemampuan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dalam penelitian ini.

**Tabel 4.15**  
**Uji R Square**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.749 <sup>a</sup>	.561	.552	3.897	1.653

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: Pemberdayaan Perempuan

Sumber: Data diolah (2020)

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R Square dalam penelitian ini adalah 0,561. Hal ini menjelaskan bahwa variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat sebesar 56% dan selebihnya sebesar 44% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutkan dalam penelitian dengan asumsi ceteris paribus.

## **4.5 Pembahasan**

### **4.5.1 Dampak transparansi dalam alokasi dana desa terhadap pemberdayaan perempuan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh**

Hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan transparansi dalam alokasi dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan perempuan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Dalam pengelolaan keuangan yang baik, transparansi merupakan satu hal yang penting. Dalam pengelolaan dana desa, wewenang dan keputusan penting yang dikeluarkan oleh pemerintah mempunyai dampak bagi orang banyak, khususnya masyarakat desa itu sendiri. Oleh karena itu informasi yang lengkap menyangkut segala kegiatan pedesaan harus disediakan oleh pemerintah.

Jawaban responden yang banyak menjawab setuju pada item pertanyaan yang penulis sediakan menunjukkan bahwa transparansi dalam pengalokasian dana desa merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah desa. Diantara beberapa contoh transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan hasil penelitian adalah pemerintah desa mengajak dan melibatkan kaum perempuan dalam musyawarah rencana pembangunan desa (musrembangdes). Dalam musrembang, pemerintah desa juga meminta saran, ide, dan suara kaum perempuan untuk perencanaan pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa di Kecamatan Syiah Kuala



memberikan kedudukan yang sama antara masyarakat laki-laki maupun perempuan dan menunjukkan perempuan yang semakin terberdaya.

Dalam pelaksanaan transparansi mengenai informasi tentang pengalokasian dana desa maupun informasi non keuangan, pemerintah desa di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh menyuguhkan informasi ini kepada masyarakat melalui spanduk dan baliho maupun di papan pengumuman desa. Dikarenakan pemerintah desa di Kecamatan Syiah Kuala Sadar bahwa memperoleh informasi mengenai keuangan desa merupakan hak setiap masyarakat, pemerintah selalu terbuka dan tidak menutup diri dalam penyediaan informasi tersebut.

Dengan adanya keterbukaan informasi dari pemerintah desa serta melibatkan perempuan dalam musyawarah dan kegiatan desa, maka perempuan perempuan dapat dicapai. Hal tersebut sangat didukung dengan ide, saran dan pemikiran yang disampaikan kaum perempuan yang kemudian dapat direalisasikan oleh pemerintah desa melalui berbagai program dan kegiatan.

Berdasarkan hasil uji data yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai signifikansi dari variabel transparansi yaitu 0,007. Hal ini berarti bahwa transparansi dalam alokasi dana desa mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan perempuan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh karena nilai signifikansi dari transparansi lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien dari transparansi yaitu 0,648 artinya apabila

terjadi peningkatan transparansi dalam alokasi dana desa naik sebesar 1 satuan maka akan berdampak pada peningkatan pemberdayaan perempuan sebesar 0,648 satuan.

Hasil dari penelitian dalam variabel transparansi ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rika Ardiyanti yang menyatakan bahwa transparansi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Judul dari penelitiannya adalah “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang” yang dilaksanakan pada tahun 2019.

#### **4.5.2 Dampak akuntabilitas dalam alokasi dana desa terhadap pemberdayaan perempuan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam alokasi dana desa mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan perempuan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Pengelolaan dana desa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa mulia dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan merupakan pengelolaan dana desa yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengalokasian dana desa. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya jawaban setuju dari narasumber

penelitian terkait dengan pernyataan yang penulis sediakan tentang akuntabilitas dana desa.

Sebagai upaya pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai alokasi dana desa, dalam hal ini pemerintah desa melakukan pemasangan spanduk pengumuman di balai desa yang berisi tentang laporan keuangan desa selama satu periode. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat khususnya kaum perempuan dapat mengetahui kondisi keuangan desa. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa ditujukan untuk semua unsur masyarakat, termasuk kaum perempuan. Dengan keterlibatan semua unsur masyarakat dalam alokasi dana desa, hal ini dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan. Perempuan mendapat kewenangan untuk ikut andil dalam pelaksanaan alokasi dana desa.

Berdasarkan uji data yang dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh nilai signifikansi dari variabel akuntabilitas yaitu 0,000. Hal ini berarti bahwa akuntabilitas dalam alokasi dana desa mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan perempuan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh karena nilai signifikansi dari transparansi lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien dari akuntabilitas yaitu 1,310 artinya apabila terjadi peningkatan akuntabilitas dalam alokasi dana desa naik sebesar 1 satuan maka akan berdampak pada peningkatan pemberdayaan perempuan sebesar 1,310 satuan.

Hasil dari penelitian dalam variabel akuntabilitas ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rika Ardiyanti yang menyatakan bahwa transparansi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Judul dari penelitiannya adalah “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang” yang dilaksanakan pada tahun 2019.



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

1. Variabel taransparansi (X1) dalam pengelolaan dana desa mempunyai dampak atau pengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan perempuan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien beta yang diperoleh variabel transparansi ini adalah sebesar 0,648 dan nilai signifikansinya sebesar 0,006 dimana nilai tersebut telah memenuhi syarat, yaitu nilai signifikansi harus kurang dari 0,05.
2. Variabel akuntabilitas (X2) dalam pengelolaan dana desa mempunyai dampak atau pengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan perempuan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien beta yang diperoleh variabel akuntabilitas ini adalah sebesar 1,310 dan nilai signifikansinya sebesar 0,000 dimana nilai tersebut telah memenuhi syarat, yaitu nilai signifikansi harus kurang dari 0,05.
3. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa secara bersama-sama mempunyai dampak atau pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan perempuan di Syiah Kuala Kota Banda Aceh karena nilai signifikansinya 0,000 dimana nilai tersebut telah memenuhi syarat, yaitu nilai signifikansi harus kurang dari 0,05.

## 5.2 Saran

1. Seluruh elemen masyarakat bersinergi dalam mengembangkan dana desa karena dana desa merupakan salah satu tombak perekonomian desa.
2. Perlu pengawasan yang lebih dari pemerintah dalam hal pengelolaan dana desa oleh aparatur desa untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
3. Pemerintah juga lebih meningkatkan proses pendampingan kepada desa khususnya dalam pencairan dana dikarenakan masih banyak sekali desa yang masih sangat membutuhkan pendampingan.
4. Selain itu harapannya pemerintah lebih memonitoring kegiatan kegiatan yang di rencanakan dalam RAPBG khusus di bidang pemberdayaan masyarakat agar pemberdayaan lebih terbuka untuk seluruh masyarakat agar lebih merata dan program yang dilaksanakan dapat sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki masyarakat setempat
5. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel bebas lainnya seperti transparansi, karena transparansi merupakan hal yang penting dalam alokasi dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Makasar: Graha Ilmu.
- Ambar & Sulistyani, Teguh. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Arianto, Putri, & Askarmin. (2019). Pemanfaatan Dana Desa Dan Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Kepulauan (Studi Di Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Volume 9, No. 2*, 144 - 153.
- Bili, Renda & Dekki. (2017). Dampak Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.6 No.3*, 2442-6962.
- Didjaja, M. (2003). *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fakih. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Fathony, Ahmad & Sopian. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Volume 10, Nomor 3*, 41-57 .
- Ghozali, I. (2011). *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Semarang: Yoga Pratama.
- Halik, Binar, & Aichi. (2001). *Jagat Wanita dalam Pandangan Para Tokoh Dunia*. Jakarta: Pustaka CIDESINDO.

- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Haspels & Suriyasarn. (2005). *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak Serta Perdagangan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
- Hikmat, H. (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat ( edisi revisi )*. Bandung: Humaniora utama press.
- Ihromi, d. (2000). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni. Bandng : Alumni.
- Inayatsyah, Bismi & Zulham, T. (2019). Evaluasi dan Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pengurangan Kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah Vol.4 No.2*, 175-183.
- Jubaedah, & dkk. (2018). Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota . *PKP2AILAN*, 57-58.
- Kemenkeu. (2019). *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: DJPK.
- Kemenkeu. (2019). *Rincian Alokasi Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam APBN T.A 2019*. Jakarta: DJPK.
- Kinanti, & Meilya . (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa. *Vol. 4 No 2*, 98-104.
- Maulana,Hilmi, & Andini. (2019). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Economics, Business and Finance Vol. 9 No.1* .



- Sarmanu. (2017) *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Surabaya: Airlangga University Perss
- Soeroso, & Moerti. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Nazilla, R. U. (2018). Efektifitas Pengendalian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya). *Skripsi*.
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugrianti & Zulkarnaini. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa. *Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 1*, 1-118.
- Padangaran. (2011). *Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat*. Kendari: Unhalu Press.
- Putra & Kusuma, Chandra. (2012). Pengelolaan Alokasi dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Wonorego Kecamatan Singisari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik. Volume 1, Nomor 6* , 1203-1212.
- Rahardjo, A. (2011). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ridha, F. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV No. 2 Juli - Desember 2019*, 252-276.

- Rochmayanti. (2015). *Pemberdayaan Perempuan Melalui Alokasi Dana Desa (Studi tentang Peran PKK di Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)*. Skripsi.
- Rozaki, A. (2005). *Prakarsa desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Yogyakarta: Ire Press.
- Rumudi, I. (2012). *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliian Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Santosa, P. (2008). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Sasangko, S. (2009). *Konsep dan Teori gender*. Jakarta: BKKBN.
- Sidik. (2002). *Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah* . Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra. (2006). *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: STKSPRESS. Bandung: STKSPRESS.
- Sumaryadi, & I Nyoman. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Supriatna, T. (2001). *Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ulum, I. (2015). *Intellectual Capital Konsep dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wrihatnolo. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan. Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media.

Zainudin. (2006). *Bias Gender Dalam Pendidikan Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Alfabeta.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Kuesioner Penelitian

### KUESIONER PENELITIAN

#### “Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh”

Nomor :

Nama :

Usia :

Pendidikan :

Mohon diisi dengan memberikan centang (√) pada kolom jawaban yang sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan:

SS = Sangat setuju

S = Setuju

KS = Kurang Setuju

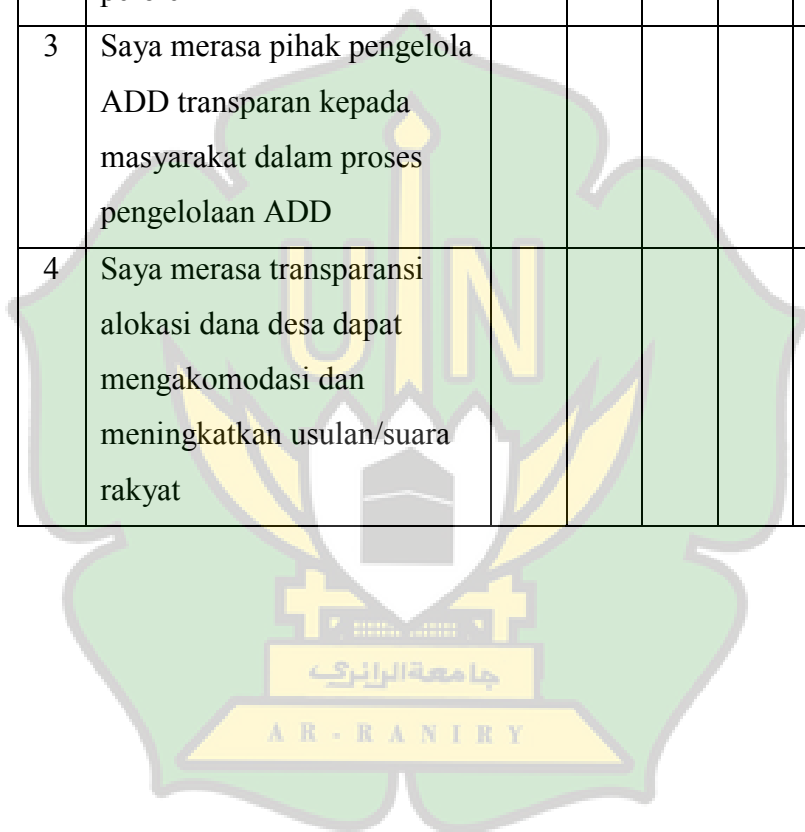
TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

#### Alokasi Dana Desa (X)

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
	<b>Transparansi</b>					
1	Selama ini menurut saya alokasi dana desa dapat meningkatkan pengelolaan					

	transparansi anggaran					
2	Akses untuk memperoleh dokumen publik tentang alokasi dana desa mudah di peroleh					
3	Saya merasa pihak pengelola ADD transparan kepada masyarakat dalam proses pengelolaan ADD					
4	Saya merasa transparansi alokasi dana desa dapat mengakomodasi dan meningkatkan usulan/suara rakyat					



	<b>Akuntabilitas</b>					
5	Tahapan pengelolaan alokasi dana desa melibatkan semua unsur-unsur masyarakat					
6	Pengelolaan alokasi dana desa disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat					
7	Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan alokasi dana desa					

### **Pemberdayaan Perempuan (Y)**

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
	<b>Kemampuan</b>					
1	Dengan adanya pemberdayaan maka kemampuan dan pengetahuan perempuan dalam melaksanakan pekerjaan mengalami peningkatan					
2	Pelatihan dapat meningkatkan kemampuan perempuan untuk menggunakan berbagai macam teknologi yang digunakan untuk					

	mendukung aktivitas kerja					
	<b>Wewenang</b>					
3	Saya dan perempuan lainnya diberikan wewenang dalam menyampaikan aspirasi					
4	Saya dan perempuan lainnya diberikan wewenang dalam membantu mensukseskan program yang diadakan oleh desa					
	<b>Kepercayaan</b>					
5	Perempuan diberikan kepercayaan untuk mengelola dana desa					
6	Informasi yang diberikan mengenai alokasi dana desa ditanggapi dengan serius					
7	Saya dipercaya untuk ikut berpartisipasi dalam musrembang desa					
	<b>Tanggung Jawab</b>					
8	Setiap perempuan diberikan tanggung jawab untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa					

9	Tanggung jawab yang diberikan kepada perempuan mengenai pengelolaan alokasi dana desa dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan					
---	---	--	--	--	--	--





## Lampiran 2 Jawaban Responden Terhadap Masing-Masing Pertanyaan

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X2.1	X2.2	X2.3	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9
2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	4	4	3
2	2	2	2	2	1	2	2	2	4	4	4	2	4	4	4
2	2	2	2	2	1	1	1	2	4	4	2	2	2	2	4
2	4	4	2	4	1	2	2	2	1	1	2	1	2	2	3
3	1	5	3	3	3	2	1	1	1	2	3	2	3	1	1
2	2	3	1	5	2	4	3	2	5	5	2	1	3	4	2
2	2	2	2	1	2	2	2	2	4	2	1	1	1	2	2
2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2
2	2	3	3	4	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2
1	2	2	1	2	2	2	2	1	2	3	4	1	3	4	3
2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	4	3
2	4	2	3	3	3	2	4	1	3	4	3	1	3	2	4
2	3	3	3	2	2	3	2	2	3	1	2	1	1	2	3
2	2	2	2	3	2	2	1	1	3	3	2	2	4	2	2
2	1	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2	2
2	2	3	2	3	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2	2
1	3	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	3	2	2	2
2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2
2	4	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	4	3	2
2	4	2	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2

2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	3	3	2	3	3	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2
2	3	3	2	3	3	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2
2	2	3	2	2	2	1	2	2	3	2	2	1	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	1	1	1	2	3	1	1	1	1	3	1	2	1	3
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1
2	3	3	2	3	3	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2
2	2	4	2	2	2	3	2	2	2	2	4	2	2	2	3
2	2	1	1	1	2	3	1	1	1	1	3	1	2	1	3
1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	1	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2
1	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2
1	2	2	1	2	2	3	1	2	1	1	1	2	2	2	2
1	3	2	2	3	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2
2	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2
5	4	4	4	4	4	5	3	4	5	4	5	5	4	3	3
5	4	4	4	4	4	5	3	4	5	4	5	5	4	3	3
3	3	3	3	3	3	3	1	2	2	3	3	3	3	3	3
3	4	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2
2	3	3	5	5	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3



2	3	3	2	1	1	2	2	2	3	3	2	1	4	2	2
2	3	3	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
3	4	3	4	4	4	3	3	3	2	2	5	4	3	2	2
3	1	3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	3	5	4
3	4	3	1	2	4	3	2	2	4	4	2	2	4	2	2
2	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	3
2	3	3	2	2	3	2	1	1	2	2	3	2	2	3	2
2	2	2	2	2	1	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
1	2	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1
2	4	2	3	2	2	3	2	2	1	1	2	2	2	2	2
3	3	3	3	2	2	3	2	2	1	1	2	2	2	2	2
2	4	1	3	1	2	3	1	1	1	1	2	3	4	5	4
2	4	1	3	1	2	3	1	1	1	1	2	3	4	5	4
2	2	3	2	3	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2	2
1	3	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	3	2	2	2
2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2
2	4	1	3	1	2	3	1	1	1	1	2	3	4	5	4
2	1	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2	2

2	4	2	3	2	2	3	2	2	1	1	2	2	2	2	2
1	2	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1
3	3	3	3	2	2	3	2	2	1	1	2	2	2	2	2
2	2	4	2	2	2	3	2	2	2	2	4	2	2	2	3
2	3	3	2	3	3	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
2	2	1	1	1	2	3	1	1	1	1	3	1	2	1	3
2	2	3	2	2	2	1	2	2	3	2	2	1	2	2	2



## Lampiran 3

## Hasil Output SPSS

**Uji Reliabilitas Transparansi****Reliability Statistics**

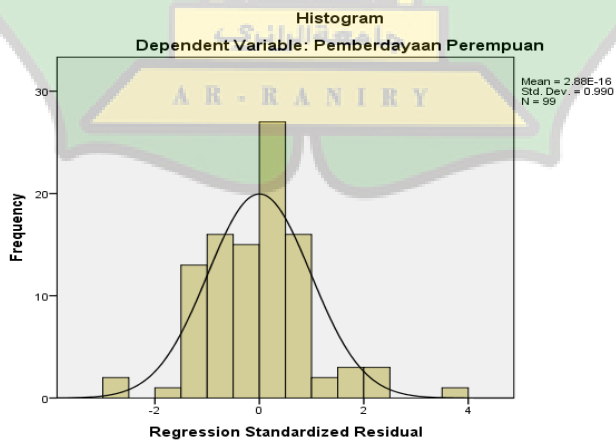
Cronbach's Alpha	N of Items
.728	4

**Uji Reliabilitas Akuntabilitas****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.751	3

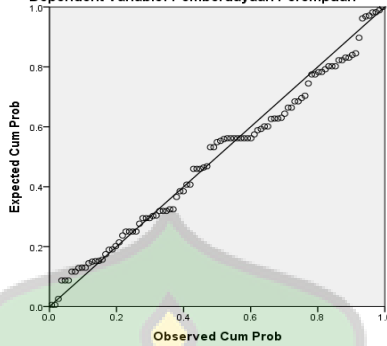
**Uji Reliabilitas Pemberdayaan Perempuan****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.887	9

**Grafk Histogram Uji Normalitas**

## Grafik Plot Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual  
Dependent Variable: Pemberdayaan Perempuan



## Uji Normalitas

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.85728362
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.072
	Negative	-.057
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

### Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.350	1.497		2.906	.005		
Transparansi	.648	.234	.283	2.763	.007	.436	2.292
Akuntabilitas	1.310	.261	.513	5.016	.000	.436	2.292

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Perempuan

### Uji Heteroskedastisitas

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	32.451	2	16.226	2.707	.072 <sup>b</sup>
	Residual	575.364	96	5.993		
	Total	607.815	98			

a. Dependent Variable: RESID

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi



## Analisis Regresi Berganda

### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.350	1.497		2.906	.005
Transparansi	.648	.234	.283	2.763	.007
Akuntabilitas	1.310	.261	.513	5.016	.000

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Perempuan

### Uji Simultan

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1866.217	2	933.108	61.435	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1458.106	96	15.189		
	Total	3324.323	98			

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Perempuan

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

### Koefisien Determinasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.749 <sup>a</sup>	.561	.552	3.897	1.653

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: Pemberdayaan Perempuan

Lampiran 4  
Dokumentasi





